



**PENGALAMAN *SOCIAL AUDIT* DI INGGRIS, AUSTRALIA,  
DAN INDIA SEBAGAI *BENCHMARK* PENGEMBANGAN  
*SOCIAL AUDIT* DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh

**BAYU APRILLIANTO**

**NIM 150820301029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENGALAMAN *SOCIAL AUDIT* DI INGGRIS, AUSTRALIA,  
DAN INDIA SEBAGAI *BENCHMARK* PENGEMBANGAN  
*SOCIAL AUDIT* DI INDONESIA**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)  
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh

**BAYU APRILLIANTO**

**NIM 150820301029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

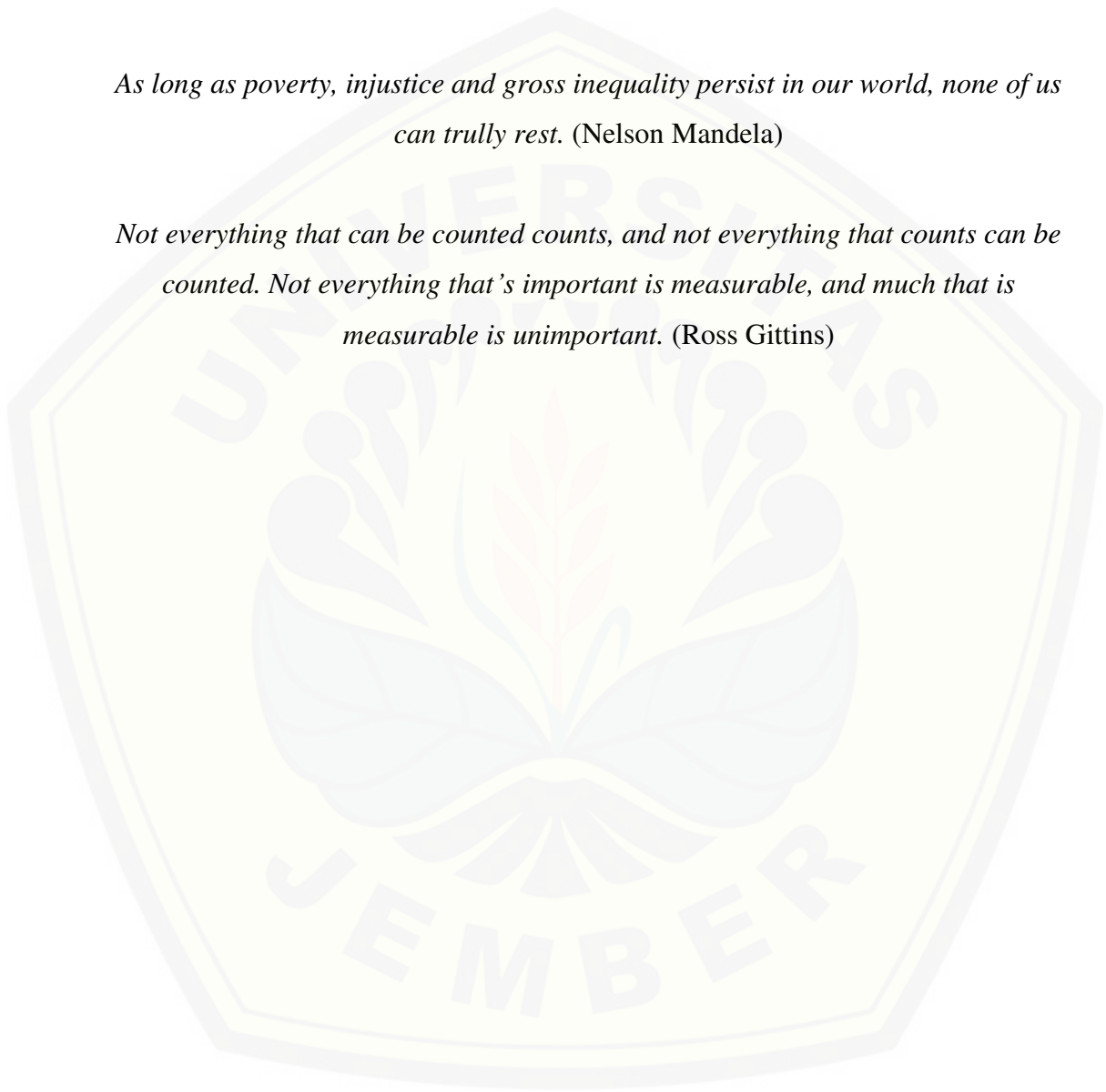
- ❖ Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
- ❖ Orang Tuaku Bapak Agus Suroyo dan Ibu Siti Aminah, Adikku Bagus Dwi Aprianata yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tulus kepada saya. Terima kasih atas segala yang telah diberikan dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan.
- ❖ Tanah Airku Indonesia. Jayalah Indonesiaku!

**MOTO**

Hidup adalah perjuangan, bahagia adalah harapan!

*As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can trully rest. (Nelson Mandela)*

*Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Not everything that's important is measurable, and much that is measurable is unimportant. (Ross Gittins)*



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bayu Aprillianto, S.E.

NIM : 150820301029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengalaman *Social Audit* di Inggris, Australia dan India Sebagai *Benchmark* Pengembangan *Social Audit* di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2018

Yang menyatakan,

Bayu Aprillianto, S.E.

NIM 150820301029

**TESIS**

**PENGEMBANGAN *SOCIAL AUDIT* DI INGGRIS, AUSTRALIA  
DAN INDIA SEBAGAI *BENCHMARK* PENGEMBANGAN  
*SOCIAL AUDIT* DI INDONESIA**

Oleh

Bayu Aprillianto

NIM 150820301029

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : Pengalaman *Social Audit* di Inggris, Australia dan India  
Sebagai  
*Benchmark* Pengembangan *Social Audit* di Indonesia

Disahkan pada

Hari, tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.**  
NIP. 19700428 199702 1 001

Anggota I

Anggota II

**Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.**  
NIP. 19640809 199003 2 001  
Anggota III

**Dr. Whedy Prasetyo, S.E., MSA., Ak.**  
NIP. 19770523 200801 1 012  
Anggota IV

**Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.**  
NIP. 19660805 199201 2 001

**Dr. Muhammad Miqdad S.E., MM., Ak.**  
NIP. 19710727 199512 1 001

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**Dr. Muhammad Miqdad S.E., MM., Ak.**  
NIP. 197107271995121001

## ABSTRAK

Penerapan *Social Audit* telah berkembang di Inggris, Australia dan India. *Social audit* bermanfaat untuk memverifikasi, memeriksa, mengevaluasi dan mengawasi penerapan CSR. Sejauh ini Indonesia hanya menerapkan jasa *external assurance* untuk laporan CSR nya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulan konsep penerapan *social audit* di Indonesia berdasarkan pengalaman penerapan *social audit* di Inggris, Australia dan India.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan penerapan *social audit*. Penerapan *external assurance* atas laporan CSR dapat dipadukan dengan konsep *Social Accounting and Auditing (SAA)* dan *Social Return on Investment (SROI)* untuk menganalisis dampak dan manfaat penerapan CSR terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga laporan CSR yang ada tidak sekedar menjadi pelaporan kuantitas program CSR tetapi juga yang menyajikan konten informasi kualitas penerapan CSR itu sendiri.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility (CSR)*, laporan CSR, *social audit*, *social assurance*.



**ABSTRACT**

*Social audit has grown in United Kingdom, Australia and India. Social Audit has benefit in verification, check up, evaluation and monitoring the CSR (Corporate Social Responsibility) implementation. Indonesia has already implement external assurance of CSR report. Thus this study aimed to review the proposed concept of social audit implementation in Indonesia based on the experiences of United Kingdom, Australia and India in social audit implementation.*

*The result of this study shows that Indonesia considerably needs to implement social audit. The implementation of external assurance of CSR report can be combined with the concept of Social Accounting and Auditing (SAA) and Social Return on Investment (SROI) to analyze the impact and benefit of CSR implementation to society and environment, accordingly the existing CSR reports are not only reporting the quantity of CSR programs but also providing the information content of CSR quality.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), CSR report, social audit, social assurance*

## RINGKASAN

Pengalaman *Social Audit* di Inggris, Australia dan India Sebagai *Benchmark* Pengembangan *Social Audit* di Indonesia; Bayu Aprillianto, 150820301029; 117 halaman; 2018; Pascasarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan serangkaian pertanggungjawaban perusahaan yang semestinya dilakukan selain operasional bisnis utama suatu perusahaan. Pemikiran etis mengarahkan bahwa perusahaan seharusnya memberikan sumbangsuhnya terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud timbal balik perusahaan. Perwujudannya melalui pertanggungjawaban sosial atau CSR. Namun, praktik tersebut tidak nyata diterapkan, sehingga muncul tekanan dari pihak lain agar diterapkan CSR yaitu dari para *stakeholder*. Sejak awal kemunculan Tahun 1960-an, CSR mulai diterapkan oleh perusahaan dan banyak orang mulai memperhatikan CSR, sehingga membuat CSR semakin berkembang hingga sekarang. CSR pun mengalami banyak evolusi berkaitan dengan implementasi hingga pelaporannya. CSR juga turut digunakan dalam pengambilan keputusan investor karena mengandung konten informasi atau bersifat informatif.

Di Indonesia, implementasi CSR sudah berkembang dengan baik. Perusahaan-perusahaan sudah menerapkan CSR-nya dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitas mereka juga telah dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan CSR yang tergabung dalam *Sustainability Report*. *National Center of Sustainability Reporting (NCSR)* Indonesia telah membuat sebuah acara penghargaan terhadap laporan tahunan perusahaan terbaik di Indonesia yaitu *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* Peningkatan perhatian terhadap implementasi CSR di Indonesia ini tidak hanya pada perusahaan umum, tetapi juga berkembang penerapannya di perusahaan berbasis islam atau syariah seperti di institusi keuangan syariah atau perbankan syariah. Perkembangan mengenai

CSR tersebut juga didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan tiga regulasi mengenai penerapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan bahwa implementasi CSR telah diatur secara tegas oleh pemerintah Republik Indonesia.

Laporan CSR digunakan membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan CSR, perusahaan menerbitkan laporan CSR baik itu yang *standalone* maupun yang tergabung dalam *annual report*. Laporan tersebut merupakan wujud akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders* seperti investor, kelompok politik, pelanggan, komunitas, karyawan, asosiasi perdagangan, pemasok, dan pemerintah. *Signalling Theory* menjelaskan konten informasi yang terkandung dalam pelaporan CSR, kemudian dikirim ke pasar untuk digunakan oleh *stakeholders* dengan berbagai tujuan, salah satunya sebagai acuan keputusan investasi di pasar modal. Muncul skeptisme terhadap laporan CSR tersebut. Alasannya karena laporan CSR tersebut belum memiliki jaminan secara independen. Relevansi dan keandalan dari laporan CSR menjadi hal yang dipertanyakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tidak adanya jaminan atas laporan CSR memunculkan kebutuhan akan adanya sebuah audit atau pemeriksaan yang memberikan *assurance* atau bahkan opini terhadap laporan CSR agar pengguna laporan CSR ini dapat mengandalkan konten laporannya. Investor pun tidak akan disesatkan oleh konten informasi yang disampaikan perusahaan melalui laporan CSR sehingga dapat membuat hasil keputusan investasi yang benar dan tepat.

Beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan India pun sudah memberikan perhatian terhadap audit ini. Indonesia sejauh ini belum memiliki regulasi terhadap penerapan *social audit* ini. Hanya ada sebuah lembaga non

pemerintah yaitu *National Center of Sustainability Reporting (NCSR)* yang memberikan perhatian terhadap pemeriksaan laporan CSR ini. Tetapi hanya sebatas *assurance* dan penggunaan jasa *assurance* ini belum digunakan secara meluas. Suharto (2008) mengenai pentingnya penerapan dan standar *social audit* di Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah konsep audit sosial terhadap laporan CSR atau yang kemudian disebut dengan audit sosial (*social audit*) di Indonesia agar perusahaan benar-benar menerapkan CSR dengan baik dan benar, tidak sekedar sebuah retorika dalam pelaporan CSR dengan pendekatan studi kualitatif fenomenologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan *social audit* karena 1) *social audit* bermanfaat untuk menciptakan pelaporan CSR yang lebih transparan dan akuntabel melalui proses verifikasi, pemeriksaan, evaluasi dan pengawasan, 2) mengacu pada Inggris, Australia dan India yang peduli dan menerapkan *social audit*, 3) Indonesia sudah memiliki NCSR Indonesia yang menyediakan jasa pelatihan *Certified Social Reporting Assuror*. Penerapan *social audit* di Inggris, Australia dan India secara umum lebih cenderung mengaudit dampak dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga akan terlihat capaian dan kontribusi CSR tersebut. Tiga negara tersebut juga telah terpadu dalam *Social Audit Network (SAN)*. Di Indonesia pun sebenarnya kepedulan untuk meng-*assure* laporan CSR sudah ada dengan penggunaan *AA1000 Assurance Standard* di beberapa pelaporan CSR.

Indonesia diharapkan mengikuti penerapan-penerapan di Inggris, Australia dan India yang lebih *concern* pada kualitas penerapan CSR daripada sekedar kualitas pelaporan CSR. Konsep *Social Accounting and Auditing (SAA)* dapat digunakan dalam penyusunan pelaporan CSR yang membahas *social value* pada masyarakat dan lingkungan, kemudian *Social Return On Investment (SROI)* digunakan apabila memang dibutuhkan proksi keuangan untuk mengukur dampak penerapan CSR. *AA1000 Assurance Standard* yang ada dapat digunakan juga untuk mengukur kuantitas penerapan CSR dalam pelaporan CSR dengan tetap menjadikan *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai pedoman pelaporan CSR.

Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan praktik penerapan dan pelaporan CSR yang lebih akuntabel dan transparan kepada semua pihak, khususnya *stakeholder*, karena laporan CSR nya sudah memenuhi karakter relevan dan andal. *Social Auditor* yang berkompeten dan tersertifikasi harus memiliki kompetensi di bidang auditing dan CSR. Terakhir, apabila perusahaan ingin menerapkan *social audit* ini harus mempertimbangkan aspek *cost and benefit*.



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ‘Pengalaman *Social Audit* di Inggris, Australia dan India Sebagai *Benchmark* Pengembangan *Social Audit* di Indonesia’ yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Pasca Sarjana (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahaan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Anggota terima kasih atas bimbingan, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya.
2. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya.
3. Bapak Ibu Penguji Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak., Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak. dan Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak., terima kasih atas segala bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun, kemudahan serta semangat yang telah diberikan. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkat dan rahmat berlimpah untuk Bapak Ibu sekeluarga.
4. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono SE, M.Si, Ak. dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak dan Bapak-Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di masa depan

5. Para informan yang telah menyediakan waktu, informasi dan pikirannya terhadap penelitian ini. Terima kasih kepada Mr. Alan Kay, Mr. Alan Greig, dan Mrs. Anne Lythgoe serta seluruh jajaran *Social Audit Network (SAN)*.
6. Terima kasih pula kepada Global Reporting Initiative (GRI) dan National Corporate Social Reporting (NCSR) Indonesia.
7. Orang tua saya tercinta Bapak Agus Suroyo, Ibu Siti Aminah dan Adik saya Bagus Dwi Aprianata. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tak henti dipanjatkan untuk saya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada mereka semua.
8. Genk Jalan-Jalan yang selalu menjadi telah dan selalu menjadi *supporter* garis keras dan radikal demi terselesainya tesis ini. Terima kasih Bu Yosefa dan Mbak Aisa.
9. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan kedua (2015), terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
10. Terima kasih kepada Tim SNAPER-EBIS 2017 yang menemani susah senang perjalanan penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	8
2.2 Aktivitas CSR .....	10
2.3 Isu <i>Stakeholder</i> dalam Penerapan CSR.....	13
2.4 Pelaporan CSR .....	18
2.5 CSR dan Peningkatan Reputasi Perusahaan .....	20
2.6 <i>Social Audit</i> .....	21
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>



3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.4 Analisis Data.....	25
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	26
3.6 Teknik Perumusan Simpulan Wawancara dan Triangulasi.....	26
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Kebutuhan Implementasi <i>Social Audit di Indonesia</i> .....	27
4.2 Implementasi <i>Social Audit</i> dalam Perspektif Internasional.....	38
4.3 Usulan Konsep <i>Social Audit</i> di Indonesia.....	45
<b>BAB 5 KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN ...</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan ...	77
5.2 Saran.....	77
5.3 Implikasi Penelitian.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	13
Gambar 4.1 Model <i>Corporate Governance Throughput</i> .....	28
Gambar 4.2 Analisis CSR Berdasarkan Waktu.....	46
Gambar 4.3 <i>Social Income Statement</i> by Prof. David Solomons.....	51
Gambar 4.4 Proses <i>Social Accounting and Auditing (SAA)</i> .....	57
Gambar 4.5 Siklus <i>Social Accounting and Auditing (SAA)</i> .....	59
Gambar 4.6 Usulan Skema Penerapan <i>Social Audit</i> .....	69

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Prinsip CSR, Proses CSR dan Isu <i>Stakeholder</i> .....	10
Tabel 2.2 <i>Checklist</i> Tema CSR Berbasis <i>Stakeholder</i> .....	14
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 <i>Website</i> Jaringan <i>Social Audit</i> .....	34
Tabel 4.2 Pemetaan Penerapan <i>Social Audit</i> Di Inggris, Australia, India Dan Indonesia.....	47
Tabel 4.3 Perbedaan Laporan CSR dan Laporan Keuangan.....	50
Tabel 4.4 Perbandingan <i>Conventional</i> dan <i>Social Income Statement</i> .....	50



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan serangkaian pertanggungjawaban perusahaan yang semestinya dilakukan selain operasional bisnis utama suatu perusahaan. Pada Februari 2010, *International Professional Practice Framework (IPPF)* mendefinisikan CSR secara umum sebagai cara perusahaan memadukan aspek *three bottom line* yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasional dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, dengan demikian mendirikan praktik perusahaan yang lebih baik dalam menciptakan kekayaan dan meningkatkan masyarakat. Selain operasional bisnis utama, perusahaan juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka. Perusahaan tidak dapat bersikap egois, karena eksistensi perusahaan juga dipengaruhi lingkungan sekitar. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut yang mendukung jalannya operasional perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan situasi ekonomi, lingkungan alam yang potensial, dan lingkungan masyarakat yang mendukung.

Pemikiran etis mengarahkan bahwa perusahaan seharusnya memberikan sumbangsuhnya terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud timbal balik perusahaan. Perwujudannya melalui pertanggungjawaban sosial atau CSR. Namun, praktik tersebut tidak nyata diterapkan, sehingga muncul tekanan dari pihak lain agar diterapkan CSR yaitu dari para *stakeholder*.

Freeman (2008:165) bahwa

*“...the key idea about capitalism is that entrepreneur or manager creates value by capturing the jointness of the interests (of the stakeholders). Yes, sometimes the interests are in conflict, but the over time they must be shaped in the same direction.”*

*Stakeholder theory* dijelaskan oleh Freeman (2008), *stakeholder* yang menekan perusahaan untuk menerapkan CSR seperti pemerintah, investor, kelompok politik, pelanggan, komunitas, karyawan, asosiasi perdagangan, pemasok, dan pemerintah sehingga perusahaan berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan para *stakeholder* tersebut.

Sejak awal kemunculan Tahun 1960-an, CSR mulai diterapkan oleh perusahaan dan banyak orang mulai memperhatikan CSR, sehingga membuat CSR semakin berkembang hingga sekarang (Maignan, 2002; Rahim dan Vicario, 2015). CSR pun mengalami banyak evolusi berkaitan dengan implementasi hingga pelaporannya. CSR juga turut digunakan dalam pengambilan keputusan investor karena mengandung konten informasi atau bersifat informatif (Chen dkk., 2015; Clarkson dkk., 2013; Griffin dan Sun, 2013).

Di Indonesia, implementasi CSR sudah berkembang dengan baik. Perusahaan-perusahaan sudah menerapkan CSR-nya dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitas mereka juga telah dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan CSR yang tergabung dalam *Sustainability Report*. *National Center of Sustainability Reporting (NCSR)* Indonesia telah membuat sebuah acara penghargaan terhadap laporan tahunan perusahaan terbaik di Indonesia yaitu *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*. Adapun kategori *best sustainability reportings* terdiri atas *overall, financial services, mining and metal, combined report, oil and gas, energy, infrastructure, Small and Medium Enterprises*, dan *First Year Report* ([ncsr-id.org](http://ncsr-id.org), diakses pada 1 November 2016). Penghargaan ini dinilai bagus untuk mendorong minat perusahaan agar semakin lebih baik dalam pelaporan CSR-nya, juga perusahaan yang belum melaporkan aktivitas CSR-nya untuk juga melakukan pelaporan CSR, bahkan juga mendorong perusahaan yang belum menerapkan CSR untuk mulai menerapkan CSR. Hal tersebut dibuktikan dalam pernyataan Darwin (2016), Ketua NCSR Indonesia bahwa di tahun 2005, hanya ada satu perusahaan yang melaporkan CSR-nya, namun setiap tahun kemudian berkembang bertambah 6-10 perusahaan. Sekarang di tahun 2016 sudah ada 126 perusahaan yang tercatat mengikuti ISRA ini.

Peningkatan perhatian terhadap implementasi CSR di Indonesia ini tidak hanya pada perusahaan umum, tetapi juga berkembang penerapannya di perusahaan berbasis islam atau syariah seperti di institusi keuangan syariah atau perbankan syariah (Indrawaty & Wardayati, 2015). Perkembangan mengenai CSR tersebut juga didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan tiga regulasi mengenai penerapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mulai

diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang – undang ini menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ada pula Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan bahwa implementasi CSR telah diatur secara tegas oleh pemerintah Republik Indonesia.

Perhatian terhadap CSR tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan pada *stakeholder* (Freeman, 2008). Maka untuk membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan CSR, perusahaan menerbitkan laporan CSR baik itu yang *standalone* maupun yang tergabung dalam *annual report*. Laporan tersebut merupakan wujud akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders* seperti inverstor, kelompok politik, pelanggan, komunitas, karyawan, asosiasi perdagangan, pemasok, dan pemerintah (Donaldson & Preston, 1995).

Perusahaan berusaha mengirimkan sinyal terhadap *stakeholders* berupa pengiriman informasi aktivitas CSR melalui laporan pertanggungjawaban sosial perusahaannya. Teori ini biasa disebut *signalling theory* (Godfrey dkk., 2010, Watts dan Zimmerman, 1986). *Signalling Theory* menjelaskan konten informasi yang terkandung dalam pelaporan tersebut, kemudian dikirim ke pasar untuk digunakan oleh *stakeholders* dengan berbagai tujuan, salah satunya sebagai acuan keputusan investasi di pasar modal.

Penelitian oleh Anderson & Frankle (1980) dan Sayekti & Wondabio (2007) menunjukkan adanya indikasi bahwa pengungkapan CSR memiliki konten informasi dan pasar mengapresiasi positif pengungkapan CSR tersebut.

Berdasarkan kebermanfaatan konten informasi yang terkandung dalam laporan CSR, maka muncul skeptisme terhadap laporan CSR tersebut. Alasannya karena laporan CSR tersebut belum memiliki jaminan secara independen. Relevansi dan keandalan dari laporan CSR menjadi hal yang dipertanyakan.

Kekhawatiran akan adanya narsisme laporan CSR terjadi sebagai akibat keraguan terhadap kebenaran konten dari laporan CSR. Narsisme tersebut memang bisa saja terjadi dalam pelaporan CSR yang diterbitkan perusahaan, mengingat belum ada penilaian independen terhadap laporan CSR tersebut (Sakina, 2014). Narsisme dalam hal ini berkaitan dengan upaya melebih-lebihkan atau bahkan memanipulasi laporan CSR suatu perusahaan dalam upaya menarik minat investor. Hal tersebut dikarenakan keberadaan CSR diharapkan mampu menaikkan reputasi perusahaan melalui penciptaan *image* perusahaan yang baik di mata masyarakat (Chen, 2015; Porter, 2010). Upaya pencitraan ini bisa saja terjadi jika mengacu pada teori legitimasi (*legitimacy theory*) dan teori agensi (*agency theory*).

Teori legitimasi ini menjelaskan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat, perusahaan membuat laporan CSR yang “dilebih-lebihkan”, “dilebih-lebihkan” dalam penyampaian deskripsi aktivitas CSR dalam laporan CSR-nya untuk motif tertentu (Godfrey dkk., 2010, Sakina, 2014, Watts dan Zimmerman, 1986). Motif tertentu dibalik pelaporan CSR dapat dijelaskan berdasarkan teori agensi. Perusahaan berupaya meningkatkan legitimasi perusahaan sebagai agen informasi dengan mendorong investor (sebagai *principal*) untuk terus menambah jumlah investasi mereka terhadap perusahaan melalui konten informasi positif yang diluncurkan (Godfrey dkk., 2010, Watts dan Zimmerman, 1986).

Motif tersebut berkaitan dengan karakter implementasi CSR yang diterapkan perusahaan. Secara umum ada dua karakter perusahaan dalam penerapan CSR yaitu *non-strategic CSR* dan *Strategic CSR*. *Non-Strategic CSR* menjelaskan bahwa perusahaan murni menerapkan CSR tanpa ada motif tertentu, hanya untuk memenuhi mandat regulasi pemerintah atau memang perwujudan filantropi perusahaan. Sementara *strategic CSR* mengacu pada bagaimana perusahaan tidak hanya sekedar menerapkan CSR (tanpa strategi/*non Strategic*



CSR), tetapi juga menanamkan strategi perusahaan melalui penerjemahan tujuan, visi dan misi perusahaan dalam implementasi CSR (Porter, 2007; Porter dan Kramer, 2006; 2003; Sayekti, 2015). Skeptismentya muncul ketika perusahaan hanya terpacu pada bagaimana mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba, maka perusahaan melebih-lebihkan laporan CSR-nya agar lebih menarik minat investor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tidak adanya jaminan atas laporan CSR memunculkan kebutuhan akan adanya sebuah audit atau pemeriksaan yang memberikan *assurance* atau bahkan opini terhadap laporan CSR agar pengguna laporan CSR ini dapat mengandalkan konten laporannya. Investor pun tidak akan disesatkan oleh konten informasi yang disampaikan perusahaan melalui laporan CSR sehingga dapat membuat hasil keputusan investasi yang benar dan tepat.

Di beberapa negara, penerapan audit terhadap implementasi CSR ini sudah dikembangkan. Audit untuk menciptakan akuntabilitas terhadap aktivitas CSR yang dilaporkan dalam laporan CSR disebut sebagai audit sosial. Beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan India pun sudah memberikan perhatian terhadap audit ini. Negara-negara tersebut bahkan telah memiliki jaringan audit tersendiri yang mengatur implementasi audit terhadap implementasi CSR ini dalam *Social Audit Network (SAN)*. Jaringan ini menaruh perhatian dan pemikirannya pada bagaimana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebuah penerapan CSR.

Indonesia sejauh ini belum memiliki regulasi terhadap penerapan *social audit* ini. Hanya ada sebuah lembaga non pemerintah yaitu *National Center of Sustainability Reporting (NCSR)* yang memberikan perhatian terhadap pemeriksaan laporan CSR ini. Tetapi hanya sebatas *assurance* dan penggunaan jasa *assurance* ini belum digunakan secara meluas. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bello dan Meka, 2015; Brown-Liburd dan Zamora, 2014; Du dan Wu, 2016; Cheng dkk., 2014; Gürtürk dan Hahn, 2015; Koldovskyi, 2015; Kolk Dan Perego, 2010; Kurihama, 2007; Rodgers dkk., 2007 juga memberikan sebuah kesimpulan tentang kebutuhan implementasi proses audit atas laporan CSR yang ada.

Berdasarkan pemikiran tentang pentingnya sebuah audit independen terhadap laporan CSR yang diterbitkan suatu perusahaan dalam rangka membangun kepercayaan dalam lingkup *governance*, manajemen, dan hubungan *stakeholder*, seperti yang digagas oleh Suharto (2008) mengenai pentingnya penerapan dan standar *social audit* di Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah konsep audit sosial terhadap laporan CSR atau yang kemudian disebut dengan audit sosial (*social audit*) di Indonesia agar perusahaan benar-benar menerapkan CSR dengan baik dan benar, tidak sekedar sebuah retorika dalam pelaporan CSR.

## 1.2 Batasan Penelitian

*Social audit* yang akan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan laporan CSR yang diterbitkan oleh perusahaan, baik secara terpisah maupun tergabung dalam laporan tahunan. *Social audit* berkaitan dengan verifikasi dan penilaian suatu aktivitas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Patokan penerapan *social audit* adalah berdasarkan pengalaman yang berasal dari Inggris, Australia, dan India. Konsep, praktik penerapan, dan standar yang tiga negara tersebut gunakan. Selanjutnya dilakukan kajian dan analisis dengan keadaan yang ada di Indonesia.

Pembahasan lainnya berkaitan dengan siapa yang berwenang melakukan audit sosial ini berkaitan dengan perbedaan dengan *general audit*, maka perlu ada kejelasan siapakah yang berwenang melaksanakan *social audit* ini di Indonesia dan bagaimana menentukan kriteria seorang *social auditor*. Auditor internal dan auditor eksternal ada dalam lini audit, apakah mereka bisa melaksanakan *social audit* ini.

Dalam bidang auditing dikenal *assurance* dan audit. Penelitian ini juga menganalisis penerapan *social assurance*, untuk dikaji dan dianalisis dalam perkembangan menuju *social audit*. Fokus *social audit* ini meliputi aktivitas dan pelaporan yang ada di dalam CSR.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana usulan konsep *social audit* di Indonesia berdasarkan penerapan di Inggris, Australia, dan India?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulan konsep *social audit* di Indonesia berdasarkan penerapan di Inggris, Australia, dan India.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian tentang *corporate social responsibility* dan *auditing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada pemantapan ilmu akuntansi pertanggungjawaban sosial.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi perusahaan yang menerapkan CSR

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian perusahaan dalam menunjukkan akuntabilitas perusahaan dalam implementasi CSR.

#### b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dan tambahan pengetahuan serta referensi dalam pengambilan keputusan investasi.

#### c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian pemerintah dalam membuat regulasi yang lebih baik berkaitan dengan CSR secara umum dan *social audit* secara khusus.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian masyarakat dalam mengawasi implementasi CSR perusahaan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini bermula pada konsep *sustainable development*, dimana dalam *Forum for the Future*, United Kingdom (2003:13) menggambarkan pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai berikut bahwa *sustainable* merupakan *capacity to continue*, sementara *development* merupakan *path of human progress*. *Sustainable development* merupakan “*A path for human progress that has the capacity to continue*”. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini dapat disimpulkan bahwa adanya pemenuhan kebutuhan manusia di masa sekarang dengan tidak merugikan pada pemenuhan kebutuhan manusia di masa mendatang dengan mengacu pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan berkelanjutan ini kemudian dihubungkan dengan adanya CSR tahun 1960-an. Tahun 2010 IPPF mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* diartikan menjadi dua: 1) Secara umum, CSR merupakan cara perusahaan memadukan aspek *three bottom line* yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasional dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, dengan demikian mendirikan praktik perusahaan yang lebih baik dalam menciptakan kekayaan dan meningkatkan masyarakat. 2) Secara khusus, CSR merupakan komitmen bisnis berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Konsep *Triple Bottom Line* menjadi basis dalam implementasi CSR yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi acuan penerapan CSR ini dalam rangka meminimalkan dampak negatif sementara tetap memaksimalkan dampak positif dari operasional perusahaan dengan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Wibisono, 2007; Akbar, 2008). Caranya adalah dengan mengintegrasikan aktivitas CSR ke dalam nilai, budaya, pembuatan keputusan, strategi, dan operasi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas (Koldovsky, 2015; Lawrence dan Weber, 2017).

Perkembangan mengenai CSR didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan tiga regulasi mengenai penerapan CSR melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Pada pasal 40 butir ke 5 dijelaskan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Tahun 2007 Undang-Undang tersebut mengalami revisi, pemerintah menerbitkan kembali UU yang sama dengan revisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-undang tersebut terdiri dari empat ayat yang menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Regulasi lain mengenai implementasi CRS yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 juga mengatur tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR telah diatur secara tegas oleh pemerintah Republik Indonesia.

## 2.2 Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan organisasi atau perusahaan memiliki diversifikasi dalam prinsip, proses, dan isu *stakeholder* seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Prinsip CSR, Proses CSR dan Isu *Stakeholder*

No.	Item CSR	Uraian
1.	Prinsip yang memotivasi CSR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CSR berbasis nilai</li> <li>2. CSR berbasis kinerja</li> <li>3. CSR berbasis <i>stakeholder</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunitas</li> <li>b. Pelanggan</li> <li>c. Regulator</li> </ol> </li> </ol>
2.	Proses CSR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Phylanthropic</li> <li>2. Sponsorship</li> <li>3. Volunteerism</li> <li>4. Kode etik</li> <li>5. Program kualitas</li> <li>6. Program kesehatan dan keamanan</li> <li>7. Manajemen dampak lingkungan</li> </ol>
3.	Isu <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunitas                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seni dan budaya</li> <li>b. Pendidikan</li> <li>c. Kualitas kehidupan</li> <li>d. Keamanan</li> <li>e. Perlindungan lingkungan</li> </ol> </li> <li>2. Pelanggan                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas produk atau jasa</li> <li>b. Keamanan</li> </ol> </li> <li>3. Karyawan                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peluang yang sama</li> <li>b. Kesehatan dan keamanan</li> </ol> </li> <li>4. Shareholder</li> <li>5. Pemasok</li> </ol>

Sumber: Maignan dan Ralston, 2002

Tabel 2.1 menjabarkan bahwa penerapan CSR itu sendiri termotivasi oleh tiga hal yaitu nilai, kinerja, dan *stakeholder*. Sementara itu, menurut Maignan dan Ralston (2002) penerapan CSR di berbagai negara di dunia ini termotivasi oleh tiga hal yaitu: 1) berbasis nilai, basis nilai di sini dijelaskan bahwa implementasi CSR

suatu perusahaan didasarkan pada nilai (*core value*) yang memang sudah ada di dalam perusahaan, tersematkan di dalam budaya organisasi suatu perusahaan. Budaya suatu negara yang memang sudah sadar akan adanya tanggung-jawab sosial ini membuat perusahaan-perusahaan di suatu negara tersebut mengimplemmentasikan CSR berdasarkan nilai; 2) berbasis kinerja, basis kinerja dijelaskan bahwa CSR diimplementasikan oleh suatu perusahaan berdasarkan kebutuhan dari internal perusahaan. Perusahaan memiliki visi dan misi, CSR digunakan oleh suatu perusahaan dalam rangka membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba atau kekayaan. Implementasi CSR ini juga disebut juga sebagai *strategic CSR* (Porter, 2007; Porter dan Kramer, 2006; Saiia dkk., 2003; Sayekti, 2015); 3) berbasis *stakeholder*, basis *stakeholder* ini mengacu pada *stakeholder theory* dimana Freeman (2008) menjelaskan bahwa implemetasi CSR ini sebagai upaya pemenuhan kepentingan yang disampaikan oleh para *stakeholder*, seperti pemerintah, investor, kelompok politik, pelanggan, komunitas, karyawan, asosiasi perdagangan, pemasok, dan pemerintah.

Proses implementasi CSR-nya sendiri ada berbagai macam. Tabel 2.1 tersebut menjelaskan bahwa program *philanthropic*, *sponsorship*, *volunteerism*, kode etik, program kualitas, program kesehatan dan keamanan, serta manajemen dampak lingkungan. IPPF Tahun 2010 secara umum menguraikan aktivitas CSR yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 1) menentukan dan mengkomunikasikan kebijakan dan proses terhadap area terhadap *corporate governance*, etika bisnis, sumber daya manusia dan karyawan, manajemen rantai pasokan, hubungan *stakeholder*, donasi dan kontribusi politik, lingkungan, kesehatan serta *wellness*; 2) mengatur tujuan, target kinerja, strategi, seperti: mengurangi emisi karbon, ketaatan terhadap hukum dan regulasi, menyumbangkan sejumlah dana dari laba bersih terhadap organisasi amal, meningkatkan jumlah tenaga kerja asli sekitar perusahaan, mengurangi insiden keamanan, mengurangi limbah, menciptakan budaya transparansi, memfasilitasi karyawan secara sukarela, menjadi *employer* dari pilihan dan meningkatkan budaya etika melalui rantai pasokan; 3) mengkomunikasikan dan menanamkan prinsip CSR dan mengontrol hingga ke dalam proses pembuatan keputusan bisnis,



seperti risiko CSR dipertimbangkan sebagai bagian dari penerimaan kerja, budaya didasarkan pada pembuatan keputusan yang benar untuk alasan yang benar, penilaian nilai siklus hidup digunakan untuk mengevaluasi dampak produk dan operasi; 4) *tracking*, pengukuran kinerja, analisis tren sekitar, dan aktivitas *benchmarking*, seperti: emisi, kesehatan dan insiden keamanan, insiden *fraud*, sejumlah donasi dan *sponsorship*, keuntungan ekonomi untuk wilayah tertentu, kepuasan pelanggan, insiden *non compliance*, komitmen terhadap *stakeholder*, aktivitas reklamasi; 5) *stakeholder engagement*, termasuk: *advisory* dan *focus group* sebagai bagian dari riset dan pengembangan, keterlibatan dalam pengembangan kebijakan dan *feedback*, survey kepuasan, proses manajemen keluhan (termasuk perlindungan atas komplain dari pembalasan dan intimidasi); 6) auditing melalui pengungkapan dalam laporan publik, pengendalian internal dan sistem manajemen, ketaatan kontraktual dengan jangka dan kondisi CSR (baik secara internal dan dengan hubungan bisnis eksternal); 7) melaporkan hasil secara internal dan eksternal, bersama dengan proses tata kelola untuk pengungkapannya.

Carroll (1991) memaparkan pengelompokan lain terhadap CSR yaitu menjadi 4 bagian yaitu: tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*). keempat bagian CSR itu digambarkan dalam sebuah piramid (lihat gambar 1). Piramida CSR dimulai dengan tanggung jawab ekonomi sebagai dasar untuk tanggung jawab yang lain. Berdirinya dan berlangsungnya perusahaan seharusnya selalu mematuhi hukum yang berlaku, karena hukum berisi hal yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat dan pemerintah. Wujud kepatuhan perusahaan tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan, maka perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab secara etis. Di posisi puncak dari penerapan CSR ini adalah wujud kontribusi perusahaan dalam mewujudkan *good corporate citizen*, mengelola sumber daya perusahaan sehingga dapat bermanfaat pada masyarakat luas dan meningkatkan *quality of life*.



Gambar 2.1 Piramida *Corporate Social Responsibility* (CSR)  
Sumber: Carrol (1991)

### 2.3 Isu *Stakeholder* dalam Penerapan CSR

*Stakeholder Theory* oleh Freeman (2008), penerapan CSR tanpa dipungkiri memang akan selalu berkaitan dengan peran *stakeholder* sebagai pendorong penerapan CSR oleh perusahaan. Maignan dan Raslton (2002) menjelaskan *stakeholder* yang berperan dalam CSR tersebut adalah komunitas, pelanggan, karyawan, *shareholder*, dan pemasok. Maka kelima pihak ini yang akan memberikan intimidasi pada perusahaan terkait proses CSR yang dijalankan suatu perusahaan.

Hasil penelitian Maignan dan Ralston (2002) menunjukkan bahwa komunitas sebagai pendorong utama penerapan CSR di berbagai negara, seperti komunitas seni dan budaya, pendidikan, kualitas kehidupan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Komunitas-komunitas tersebut yang turut memberikan kritik dan saran pada perusahaan terkait kepedulian mereka pada keberlangsungan bidang komunitas mereka, sehingga mereka mengharap perusahaan dapat bertanggungjawab secara sosial pada lingkungan yang dimaksud.

Perrini (2005) menganalisis bahwa ada delapan faktor yang *stakeholder* yang berhubungan dengan perusahaan dalam penerapan CSR, yaitu: sumber daya

manusia, *shareholder*, pelanggan, pemasok, partner finansial, otoritas publik, komunitas, dan lingkungan, yang selanjutnya digambarkan dalam berikut:

Tabel 2.2 *Checklist* Tema CSR Berbasis *Stakeholder*

Kategori Berbasis <i>Stakeholder</i>	Tema CSR
Sumber Daya Manusia	Pergantian komposisi staf Rata-rata perawatan Pelatihan Jam kerja Skema upah Kerja berbentuk absen Keuntungan karyawan Hubungan industrial Komunikasi <i>In-House</i> Kepuasan personel pada kesehatan dan keamanan Hak pekerja Ukuran dan litigasi kedisiplinan
Shareholder	Formasi Saham Kinerja rating pembayaran partner atau <i>shareholder</i> Pengelolaan perusahaan Manfaat dan layanan Hubungan investor
Pelanggan	Karakter pelaggan Pengembangan pasar Kepuasan pelanggan Loyalitas pelanggan Pelabelan dan informasi produk atau layanan Produk/layanan etis dan lingkungan Kebijakan promosi Privasi
Pemasok	Kebijakan manajer pemasok Kondisi kontraktual
Mitra Keuangan	Hubungan dengan bank Hubungan dengan perusahaan asuransi Hubungan dengan lembaga keuangan
Otoritas Publik	Pajak dan kewajiban Hubungan dengan otoritas lokal Kode pengadaan dan kepatuhan hukum Manfaat kontribusi atau keuangan jangka mudah
Komunitas	Pemberian perusahaan Kontribusi langsung dalam area intervensi yang berbeda Perjanjian <i>stakeholder</i> Hubungan dengan media Komunitas virtual Pencegahan korupsi
Lingkungan	Konsumsi energy Material Emisi Strategi dan hubungan lingkungan dengan komunitas

Sumber: Perrini, 2015

Tabel 3 menguraikan aktivitas CSR berdasarkan per masing-masing kepentingan para *stakeholder*. Ada delapan *stakeholder* mulai dari sumber daya

manusia, *shareholder*, pelanggan, pemasok, mitra keuangan, otoritas publik, komunitas, dan lingkungan.

## 1. Sumber Daya Manusia

Hubungan antara stakeholder dan perusahaan dapat diwujudkan dengan adanya pertimbangan pada basis *bottom line* perusahaan sebagai upaya peningkatan kemampuan dengan memuaskan ekspektasi sumber daya manusia. Kaptein dan Van Tulder (2003) memaparkan bahwa tidak hanya sensitivitas perusahaan terhadap lingkungannya tetapi juga meningkatkan pemahaman lingkungan dari dilema menghadapi organisasi. Perrini (2005) mengungkapkan bahwa manajemen aspek harus diperhatikan seperti kesehatan, keamanan, dan pelaporan lingkungan.

Komunikasi internal menerima urusan yang besar dari cakupan yang paling mungkin karena itu membentuk basis hubungan atasan dan bawahan. Komunikasi internal juga memainkan peranan penting dalam merancang dan diseminasi budaya perusahaan dan menstimulasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya publikasi internal, konvensi, intranet platform dan lain-lain dapat memiliki dampak langsung pada motivasi dan komitmen pekerja, meningkatkan pembagian informasi, dan perlindungan dan penguatan *brand* dengan semua *stakeholder* (Perrini, 2005).

## 2. *Shareholder* dan Komunitas Finansial

Deskripsi hubungan antara perusahaan dan komunitas finansial umumnya ditemukan dalam dokumen-dokumen lainnya yang berfokus pada isu-isu tata kelola perusahaan. Sementara tingkat pelaporan umum tentang hubungan mereka dengan pemegang saham dan komunitas finansial tergolong rendah, perusahaan tidak cenderung berfokus pada tata kelola perusahaan. Mereka sering membatasi diri untuk menyatakan komitmen mereka untuk standar tata kelola perusahaan nasional atau internasional dan praktik terbaik. Laporan *shareholder* dan mitra finansial bertujuan merinci upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan dialog dengan pemegang saham dan mitranya. Tema-tema CSR berbaring pada asumsi bahwa identitas perusahaan, nilai-nilai dan misi juga tercermin identitas mitra perusahaan. Pertimbangan yang sama dapat ditarik dari informasi mengenai remunerasi pemegang saham/mitra, serta fluktuasi harga saham. Dalam

kasus ini, adopsi dari tampilan multi tahun dalam mengukur indikator tersebut adalah sangat penting dalam memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami keadaan kesehatan perusahaan dan kemampuannya untuk menciptakan dan membagi nilai dan kekayaan (Perrini, 2005)

### 3. Konsumen

Seperti yang ditunjukkan oleh tingkat insiden, yang "dialog laporan" antara perusahaan dan pelanggan mereka jelas berpusat pada tiga tema utama CSR: kebijakan promosi, deskripsi produk dan jasa yang etis dan lingkungan dan praktek pelabelan. Pertama-tama, menyediakan pelanggan dengan gambaran yang lengkap dari saluran komunikasi aktif dan kebijakan promosi, memberi mereka kemungkinan untuk mengetahui metode melalui mana mereka dapat mencapai perusahaan secara konkret. Selanjutnya, melalui penyediaan informasi tentang saluran komunikasi dan kampanye iklan, perusahaan menggarisbawahi potongan-potongan informasi sosial yang tidak jelas tapi berguna untuk memperkuat produk atau perusahaan sosial dan lingkungan fitur dan gambar, terutama ketika produk dan jasa dianggap sebagai pengalaman yang baik (McWilliams dan Siegel, 2001).

Produk atau informasi layanan dan pelabelan, produk dan jasa etis dan lingkungan malah lebih erat dengan konsep perusahaan yang bertanggung jawab, bertujuan mengevaluasi komitmen perusahaan untuk menciptakan produk-produk atau jasa yang benar-benar melindungi kepentingan konsumen dan konsumen, dan memastikan transparansi komunikasi pada kualitas, dampak lingkungan dan keamanan produk (Perrini, 2005)

### 4. Pemasok

Sebuah perusahaan yang bertanggung jawab adalah perusahaan mampu secara sistematis membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan secara keseluruhan di mana ia beroperasi. Dalam hal ini, kesadaran yang mendalam dari lingkungan mereka sendiri, termasuk mata rantai pasokan, merupakan prasyarat penting untuk bertanggung jawab secara efektif (Maignan, Hillebrand dan McAlister, 2002).

Tema manajemen pemasok menerima banyak perhatian dalam laporan yang dianalisis, mungkin karena perusahaan tampaknya lebih sadar dari

sebelumnya bahwa mereka adalah bagian dari sistem terbuka, dinamis terkait dengan lingkungannya referensi, dan bahwa pemasok mereka merupakan perpanjangan dari perusahaan itu sendiri. Jelas, organisasi bercita-cita untuk bertanggung jawab (Perrini, 2005)

## 5. Mitra Keuangan

Mitra keuangan pemangku kepentingan jarang dimasukkan dalam laporan dianalisis, meskipun perannya yang penting. Dalam situasi ini dimensi perusahaan membuat perlu untuk beralih ke mitra (bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, dan sebagainya) untuk dukungan keuangan dari pertumbuhan perusahaan dan pembangunan daerah. Dimana dimasukkan semua data dan informasi yang berguna untuk menjelaskan hubungan finansial yang dikumpulkan dimulai dari view kemitraan, diuji pada upaya demonstrasi menuju konvergensi dan dukungan resiprok (Perrini, 2005).

Situasi saat ini mengacu pada rendahnya kesadaran perusahaan atas kesempatan untuk memasukkan bank, perusahaan asuransi dan mitra keuangan lainnya (misalnya, perusahaan leasing) dalam laporan, mengingat mereka pemangku kepentingan yang relevan dalam akuntabilitas dan proses pelaporan. Terlebih lagi, perusahaan bisa menggunakan area ini untuk semua informasi mengenai profil risiko perusahaan (Perrini, 2005).

## 6. Otoritas Publik

Pengungkapan perusahaan terhadap otoritas publik (yaitu Pemerintah, Lokal dan Otoritas Umum dan Lembaga) terasa lebih tinggi dari mitra keuangan. Tema mengenai kode etik dan aturan untuk mematuhi hukum menunjukkan tingkat tertinggi konvergensi. Ini mungkin penting bagaimana masuknya data yang berhubungan dengan verifikasi kesesuaian dan inspeksi dapat menjadi relevan untuk sebuah perusahaan yang ingin bertanggung jawab. Rasio indikator tersebut adalah untuk menyoroti kurangnya hukum tindakan/tuntutan hukum dan untuk memverifikasi konsistensi perilaku yang dinyatakan (kode pengadaan, kode etik, kebijakan, dll) dengan perilaku dilaksanakan (Perrini, 2005).

## 7. Komunitas Lokal dan Global

Hubungan tanggung jawab sosial dengan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh sampel, dimulai dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif dan pencegahan korupsi. Semua inisiatif ini disajikan dalam laporan non finansial saat ini. Pemegang saham menjadi lebih aktif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan dan evaluasi dari kebijakan perusahaan, rencana aksi ini adalah hasil langsung dari pemegangan diskusi reguler pada apa yang bisa dan perlu diberikan prioritas dan dianggap penting (Hess, Rogovsky dan Dunfee, 2002).

## 8. Lingkungan Hidup

Kesimpulan informasi dalam laporan non finansial bertujuan memberikan penilaian lengkap dari kinerja perusahaan, sejalan dengan pendekatan *triple bottom line*. Dalam hal ini, perusahaan berbagi kehendak untuk membuat CSR dan pembangunan berkelanjutan saling kompatibel satu sama lain, mencoba untuk mengkomunikasikan kemampuan mereka untuk memperhitungkan kebutuhan pertimbangan yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan dan dampak keseluruhan dari operasi terhadap lingkungan (Perrini, 2005)

### 2.4 Pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Laporan CSR dapat menjadi alat komunikasi bisnis perusahaan terhadap para *stakeholder* (Golob dan Barlett, 2006). Maka praktik atas CSR atau aktivitas penerapan CSR memang seharusnya diungkapkan dan dilaporkan khususnya kepada para *stakeholder*, bahkan aktivitas terkait masalah lingkungan dan sosial sudah menjadi sesuatu yang mutlak pada beberapa dekade ini (Deegan, 2002).

Golob dan Barlett (2006) menemukan bahwa pengungkapan dan pelaporan aktivitas CSR terbagi menjadi *voluntary* dari pada *regulated*. Hal tersebut dipengaruhi oleh basis nilai penerapan CSR suatu negara, *voluntary* atau *mandatory*. Dalam penyusunan laporan CSR ini, SA8000, AA1000S, GRI, atau *ILO conventions* dapat menjadi acuan, pedoman, atau standar penyusunan laporan CSR, baik itu yang *standalone* maupun yang tergabung dalam *annual report*.

Secara umum, praktik pelaporan CSR sendiri masih belum memiliki standar tertentu yang digunakan secara universal. Laporan CSR masih dibuat dengan standar pelaporan yang sifatnya *customize* tergantung dari masing-masing perusahaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak hal yang salah satunya jelas berkaitan dengan regulasi di suatu negara. Sebenarnya pelaporan CSR tersebut dapat membantu pembaca seperti investor, karyawan, pemasok, dan pelanggan yang dalam rangka membuat keputusan tentang keterlibatannya dalam bisnis perusahaan yang bersangkutan (IPPF Tahun 2010).

IPPF (2010) menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan CSR tersebut dapat mempertimbangkan keputusan bisnis mereka berkaitan dengan *cost and benefit* dalam memproduksi informasi CSR dan dapat pula menyertakannya dalam laporan CSR. Metode pelaporan CSR dapat memasukkan publikasi laporan CSR *standalone*, integrasi informasi CSR ke dalam *annual report*, dan mempersiapkan pemilihan *booklet* informasi CSR pada topik atau peristiwa tertentu bagi distribusi publik. Format distribusi memasukkan: *web pages, press releases, regulatory fillings, handouts* dan presentasi pada pertemuan *stakeholder* publik, video, informersial, dan komersial.

Standar lain selain yang diatur dalam IPPF tersebut yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*. GRI merupakan salah standar yang paling sering digunakan diberbagai negara berdasarkan studi-studi terdahulu dan juga bersifat universal. Oleh karena itu tidak salah jika GRI telah berkembang bahkan di Tahun 2014 GRI telah merilis GRI G4 (Generasi 4) berdasarkan riset dan pengembangan yang secara kontinyu dilaksanakan oleh dewan internalnya. Oleh karena itu, GRI bisa digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan pengungkapan aktivitas CSR. GRI itu sendiri terbagi menjadi standar umum berupa strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, dan etika & integritas., kemudian standar khusus mengatur pengungkapan CSR perusahaan terkait pendekatan manajemen berdasarkan *triple bottom line* yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan jumlah secara keseluruhan 150 item *checklist*.

Di Indonesia sendiri, meskipun sudah ada regulasi *mandatory* terhadap implementasi CSR pada perusahaan di bidang tertentu, namun masih belum ada



regulasi pemerintah yang secara spesifik mengatur mengenai pelaporan CSR oleh perusahaan tersebut. Namun, rupanya perusahaan yang telah melaksanakan CSR ini telah secara sukarela (*voluntary*) melaporkan implementasi CSR mereka dalam wujud laporan tahunan atau *sustainability reporting*. Hal ini didukung dengan adanya 126 perusahaan yang mengikuti ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Award*) per tahun 2015.

## **2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Peningkatan Reputasi Perusahaan**

Kredibilitas, keandalan, dan transparansi diragukan dalam laporan CSR. Hal tersebut dikarenakan dalam penerbitan laporan CSR tidak melalui proses audit. Skeptisme pembaca laporan CSR tersebut muncul karena kekhawatiran adanya upaya narsisme atau upaya melebih-lebihkan laporan CSR tersebut bahkan paling buruk mungkin menyimpan adanya manipulasi dalam pelaporan CSR (Sakina, 2014). Hal tersebut dikarenakan keberadaan CSR diharapkan mampu menaikkan reputasi perusahaan melalui penciptaan *image* perusahaan yang baik di mata masyarakat (Chen, 2015; Porter, 2010).

Perusahaan tidak hanya sekedar menerapkan CSR (tanpa strategi/*non Strategic CSR*), namun juga memasukan strategi perusahaan melalui penerjemahan visi dan misi perusahaan dalam implementasi CSR (Porter, 2007; Porter dan Kramer, 2006; Saiia dkk., 2003; Sayekti, 2015). Hal tersebut diperbolehkan, tidak dilarang. Motivasi penerapan CSR dengan basis kinerja sah sah saja dilakukan. Perusahaan boleh menggunakan CSR sebagai cara perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba. *Image Branding* boleh, hanya saja dengan cara yang etis sesuai dengan *core value* dari CSR sendiri. Kemudian apa yang perlu ditakutkan? Skeptis karena apa? Apabila ‘celah’ tersebut disalahgunakan oleh perusahaan untuk tujuan yang negatif semata-mata untuk meningkatkan reputasi perusahaan sehingga melakukan narsisme dan manipulasi dalam pelaporan CSR.

Motivasi penerapan CSR ada yang termotivasi untuk menciptakan *image* positif di mata *stakeholder* dan khususnya investor. Hubungan sebuah penilaian CSR yang baik dengan pasar jelas akan meningkatkan reputasi perusahaan itu

sendiri. Hasilnya perusahaan tersebut diharapkan mampu mengalami kenaikan dalam kinerja keuangan dan juga kinerja sahamnya di pasar modal, sehingga tujuan perusahaan tersebut untuk memperoleh laba perusahaan yang sebesar-besarnya akan mudah tercapai (Argenti dan Druckenmiller, 2003; King dan McDonnel, 2013; Sacconi; 2004).

## 2.6 Social Audit

Kata audit berasal dari bahasa latin yang secara umum didefinisikan sebagai akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang diterbitkan (Arens, dkk, 2014). Sementara CSR secara umum didefinisikan sebagai cara perusahaan memadukan aspek *three bottom line* yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasional dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, dengan demikian mendirikan praktik perusahaan yang lebih baik dalam menciptakan kekayaan dan meningkatkan masyarakat (IPPF, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa audit sosial sebagai metode evaluasi bukti mengenai informasi dalam pelaporan CSR yang dilakukan secara sistematis agar didapat derajat korespondensi antara informasi yang diterbitkan. Audit sosial ini digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memahami, melaporkan, dan meningkatkan kinerja sosial dan etik, sehingga bermanfaat bagi manajemen dalam proses perencanaan, *managing*, dan pengukuran aspek non finansial, serta juga untuk pengawasan pengaruh kinerja sosial dan bisnis internal dan eksternal organisasi (Koldovsky; 2015; Lawrence and Weber, 2017; Timane dan Chavan, 2012).

Saat ini, laporan CSR di Indonesia hanya sekedar dipublikasikan dan digunakan oleh pengguna laporan tanpa adanya proses audit. Hal ini memiliki kelemahan dalam kredibilitas atas konten laporan CSR-nya. Proses audit ini sebenarnya dapat membantu perusahaan dalam meng-*assure* dan memverifikasi konten laporan CSR mereka. Laporan CSR yang sudah diaudit ini nantinya akan meningkatkan legitimasi perusahaan kepada masyarakat, investor, pemerintah dan *stakeholder* lain atas laporan CSR mereka (Godfrey et al., 2010; Watts and Zimmerman, 1986).

Bagi perusahaan, *social audit* memiliki manfaat dalam membantu mengevaluasi dan memonitor aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan pada periode pelaporannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan dan perbaikan secara kontinyu atas program CSR mereka (Koldovsky, 2015; Sushmita; 2013; Timane and Chavan, 2012; Kurihama, 2007). Sehingga di masa depan, sebuah laporan CSR yang telah diaudit dapat bermanfaat bagi internal perusahaan dan juga dapat digunakan secara terpercaya oleh pengguna eksternal.

Akuntansi dan audit sosial (*Social Accounting and Auditing* atau SAA) berhubungan dengan penilaian terhadap nilai sosial yang dilakukan oleh organisasi. SAA membantu membuktikan, meningkatkan, dan mempertanggungjawabkan apa yang sedang dibuat. SAA berupaya untuk merencanakan dan mengatur organisasi serta menunjukkan apa yang telah dicapai. SAA merupakan kerangka logis dan fleksibel yang memungkinkan organisasi untuk membangun dokumentasi dan sistem pelaporan yang ada dan mengembangkan proses dimana dapat mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap dampak kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi; menyediakan informasi yang penting untuk perencanaan masa depan dan meningkatkan kinerja; dan menjadi *accountable* terhadap semua partner kerja ([www.socialauditnetwork.org.uk](http://www.socialauditnetwork.org.uk) diakses tanggal 31 Mei 2018). Ada 8 prinsip dasar dalam penerapan SAA, yaitu: mengklarifikasi tujuan, mendefinisikan ruang lingkup, mengikutsertakan *stakeholder*, menentukan *materiality*, membuat perbandingan (*benchmarking*), menjadi transparan, memverifikasi *account*, dan menanamkan proses.

Artikel GRI (2013) yang berjudul *the external assurance of sustainability reporting*, membahas suatu kebutuhan yang sama terhadap penilaian independen terhadap laporan tahunan perusahaan. Artikel tersebut menjabarkan kebutuhan adanya *external assurance* terhadap laporan tahunan. Organisasi mencari *assurance* dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan kepercayaadirian dalam cakupan tata kelola, manajemen, dan hubungan stakeholder. Ada dua keuntungan dari *external assurance* atas laporan tahunan yaitu untuk

meningkatkan pengakuan, kepercayaan, dan kredibilitas; dan mengurangi resiko dan meningkatkan nilai laporan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kredibilitas, keandalan, dan transparansi terhadap suatu laporan CSR dapat ditempuh dengan melakukan *social audit* dan *social assurance*. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan jaminan kredibilitas dan kepercayaan secara independen terhadap laporan CSR dan aktivitas CSR, namun keduanya berbeda dalam hal output, jika *social audit* memungkinkan dibentuknya opini audit seperti audit keuangan, maka *social assurance* hanya sebatas pada pemberian *assurance statement*.



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian meliputi perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain yang secara holistik, dan dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013). Studi kualitatif ini digunakan agar dapat mengungkap dan menguraikan fakta-fakta secara rinci mengenai implementasi audit sosial di berbagai negara sehingga dapat disusun sebuah konsep implementasi audit sosial di Indonesia. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui analisis terhadap kajian-kajian literatur yang dikumpulkan dan dibahas dalam penelitian ini, kemudian dikroscek dengan hasil wawancara dengan para pakar di bidang audit sosial di berbagai negara.

Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi ini merupakan studi kualitatif yang digunakan untuk mempelajari tentang suatu fenomena berdasarkan pengalaman dari beberapa individu, deskripsi fenomena tersebut berisi tentang apa yang dialami dan bagaimana mereka mengalaminya untuk kemudian diinterpretasikan oleh peneliti (Creswell, 2007; Fatchan, H.A., 2011).

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan situasi objek yang diteliti dengan benar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tertulis dari kajian-kajian literatur dan data kata-kata atau tindakan dari para informan penelitian. Sementara sumber data penelitiannya berasal dari sumber langsung atau asli dari literatur dan studi yang berkaitan serta pernyataan-pernyataan para informan penelitian (Moleong, 2013).

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu

- 1) Dengan cara mencari artikel penelitian dan literatur buku yang berkaitan dari perpustakaan dan sumber jurnal elektronik. Teknik pengumpulan data ini melalui proses seleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan pembahasan dan keandalan dari sumber literatur tersebut.
- 2) Dengan cara proses wawancara dengan para pakar dan praktisi di bidang audit sosial ini. Tujuan wawancara ini dilakukan yaitu untuk mengklarifikasi hasil analisis implementasi audit dan analisis konsep pada sumber literatur.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan/Institusi	Keterangan	Media
1.	Mr. Alan Kay	<i>Regional Co-Ordinator of Social Audit Network of Scotland</i>	Email
2.	Mrs. Anne Lythgoe	<i>Regional Co-Ordinator of Social Audit Network of North West England</i>	Email
3.	Mr. Alan Greig	<i>Director of Mercury Coperative of Australia</i>	Email
4.	Mr. Ali Darwin	<i>Executive Director and Executive Board Chairman of National Center of Sustainability Reporting, Indonesia</i>	Email
5.	Global Reporting Initiative (GRI)	Institusi Pembuat Pedoman Pelaporan CSR	Email

Sumber: [www.socialauditnetwork.org.uk](http://www.socialauditnetwork.org.uk)

### 3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 8 tahapan mengacu pada Creswell (1998) dan Creswell (2007) dalam kajian fenomenologinya yaitu:

- a. Peneliti mendeskripsikan fenomena atau pengalaman yang dialami oleh informan yang menjadi subjek penelitian.
- b. Peneliti menganalisis pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara dengan perlakuan bahwa setiap pernyataan memiliki nilai yang setara,

kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan.

- c. Pengelompokan pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara dalam unit-unit bermakna dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama.
- d. Peneliti merefleksikan hasil pemikirannya berdasarkan pernyataan-pernyataan para informan atau yang disebut sebagai tahapan horisonalisasi. Peneliti menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi strukturalnya untuk mendapatkan keseluruhan makna melalui perspektif yang divergen, mempertimbangkan kerangka rujukan atas fenomena, dan mengkonstruksikan bagaimana fenomena tersebut dialami.
- e. Peneliti mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi fenomena.
- f. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya yang menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman-pengalaman seluruh informan.

### **3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dimaksudkan untuk memeriksa derajat kepercayaan suatu data sehingga dapat layak diteliti dan disajikan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2013), Sesuatu yang lain dalam penelitian ini adalah teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan auditing, *Corporate Social Responsibility*, dan *social audit* tentunya.

### **3.6. Teknik Perumusan Simpulan Wawancara dan Triangulasi**

Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan dan menyusun skema penerapan *social audit* di Indonesia. Tahapan ini menggunakan refleksi pemikiran peneliti dengan menggunakan hasil analisis pernyataan para informan untuk kemudian dikolaborasi dengan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai

auditing, *Corporate Social Responsibility*, dan *social audit*. Selanjutnya peneliti juga menuangkan pemikirannya berkaitan dengan pertimbangan *cost* dan *benefit* atas penerapan *social audit* ini berdasarkan pengalaman-pengalaman *social audit* di Inggris, Australia, dan India.





## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

### 5.1 Kesimpulan

Indoensia membutuhkan penerapan *social audit* sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR dan juga sebagai alat evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas CSR yang dilaporkan oleh perusahaan. Sebuah konsep pelaksanaan *social audit* di Indonesia telah diusulkan dalam penelitian ini berdasarkan analisis *inside* dan *outside*. Analisis *inside* mengacu pada keadaan Indonesia sekarang yang mendukung dan menjadi modal diadakannya *social audit* di Indonesia, sementara *outside* menganalisis penerapan *social audit* di luar negeri seperti Inggris, Australia, dan India. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- 1) Indonesia sejauh ini telah memiliki penerapan *social assurance* (*external assurance*) atas laporan CSR, layanan ini diberikan oleh NCSR Indonesia dan SGS Indonesia. *Assurance* ini lebih mengarah pada meng-*assure* laporan dengan mengacu pada pendekatan kuantitas program CSR yang telah dilaksanakan berdasarkan isu-isu tertentu sesuai standar *social assurance*-nya. Hal ini dapat menjadi modal penerapan *social audit* di Indonesia.
- 2) Inggris, Australia, dan India juga sudah memiliki penerapan *social assurance*. Namun tiga negara tersebut sudah mengembangkan konsep dan penerapan *social audit*. Ketiganya sama-sama menggunakan *Social Accounting and Auditing (SAA)* dan *Social Return on Investment (SROI)*. Dua konsep tersebut mengacu pada pengukuran dampak dan manfaat CSR yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Konsep *social audit* ini lebih mementingkan kualitas dari sebuah penerapan CSR dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Hasil usulan terhadap penerapan *social audit* di Indonesia dapat ditempuh dengan menggabungkan hasil analisis *inside* dan *outside* tersebut. Indonesia dapat menerapkan *social audit* dengan pendekatan kuantitas dan kualitas. Pendekatan kuantitas pelaksanaan program CSR dapat tetap mengacu pada *AA1000 Assurance Standard* yang telah digunakan di Indonesia, juga tetap menggunakan GRI sebagai pedoman pelaporannya. Sementara untuk kualitas program CSR dapat

menggunakan konsep SAA dan SROI untuk menganalisis dampak dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan, dengan catatan bahwa laporan CSR-nya pun harus juga menyertakan informasi manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.

## 5.2 Keterbatasan dan Saran

Adapun saran-saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. *Social audit* akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pemerintah melalui ketentuan legal (regulasi) dari pemerintah untuk melakukan *social audit*. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pihak seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya terhadap *social audit*, karena *social audit* bermanfaat bagi kita, pemerintah, dan perusahaan serta alam semesta.
2. Perusahaan dapat menerapkan *social audit* dapat diterapkan dengan mengacu pada konsep *social audit* yang disusun dalam penelitian ini.
3. Untuk penerapan *social audit* dengan pendekatan kualitas dapat menggunakan SAA dan SROI sebagai acuan konsep dan penerapannya.
4. Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mulai menambah kompetensinya di bidang CSR, sehingga dapat memberikan layanan *social audit* ini.
5. Konsep *social audit* yang telah dibangun dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan dan kelemahan, penelitian selanjutnya dapat menguji, menganalisis, dan mengembangkan konsep *social audit* dalam penelitian ini.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu lebih memfokuskan studi fenomena pada penerapan *social audit* di negara-negara berkembang lain yang memiliki kesamaan *setting* dengan Indonesia, sehingga tambahan hasil analisis yang dapat diterapkan ke Indonesia.
7. Elaborasi penerapan CSR di Indonesia dengan analisis penerapan SA1000 *Assurance Standard* serta SA8000 di Indonesia dan negara-negara lain yang sudah menggunakan standar-standar tersebut.
8. Melakukan studi kasus mengenai penerapan *social audit* dengan pendekatan kualitas dampak pada negara-negara yang sudah menerapkan untuk mendapatkan tambahan konsep bagi penerapan *social audit* di Indonesia.

9. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji *value added* atas laporan CSR yang telah diaudit.

### 5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu tentang *corporate social responsibility*, *social accounting* dan *auditing*.
2. Publikasi dan sosialisasi hasil penelitian ke perusahaan-perusahaan yang sudah melaporkan laporan CSR agar memahami pentingnya *social audit* untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR.
3. Penyampaian hasil penelitian ke Bursa Efek Indonesia agar pentingnya *social audit* disosialisasikan kepada investor dan *broker* agar menjadi pertimbangan dan tambahan pengetahuan serta referensi dalam pengambilan keputusan investasi.
  - e. Penyampaian hasil penelitian kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bahan kajian penerbitan regulasi penerapan *social audit*, bagi Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Alam, Perindustrian, Pertanian, Perdagangan, Perhubungan, Kelautan dan Tenagakerjaan, Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Agraria dan Tata Ruang, BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar mengevaluasi dan mengawasi penerapan CSR di Indonesia, serta bagi Kementerian Riset dan Teknologi agar menjadi kajian dalam pengembangan ilmu *social audit*.
4. Sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat dan komunitas agar meningkatkan evaluasi dan pengawasan atas penerapan CSR yang mereka rasakan dan terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Saffana dan Anantadjaya, Samuel PD. 2013. CSR & Performance: Any Evidence from Indonesian LQ45. *RIBER: Review of Integrative Business & Economics Research*, April 2013, Volume 2, Issue 1, pp 85-101.
- Aldrich, H. dan Fiol, M. (1994). Fools rush in? The institutional context of industry creation. *Academy of Management Review*, 19(4), 645–670.
- Argenti, Paul A dan Druckenmiller, Bob. 2003. Reputation and Corporate Brand. *Tuck School of Business Working Paper* No. 03-13.
- Bello, Holtjana dan Meka, Elvin S. 2015. Auditing of Corporate Social Responsibility (Case Study – Albanian Banking Sector). *SSRN Electronic Journal*.
- Brown-Liburd, Helen L. Zamora dan Valentina L. 2014. The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Assurance in Investors' Judgements When Managerial Pay is Explicitly Tied to CSR Performance. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Forthcoming.
- Carrol, Archie B. dan Beiler, George W. 1975. Landmarks in the Evolution of the Social Audit. *The Academy of Management Journal*. Vol. 18. No.3. Sep. 1975. Halaman 589-599.
- CGG (Centre for Good Governance). 2005. *Social Audit: A Toolkit. A Guide for Performance. Improvement and Outcome Measurement*. Hyderabad: Director General & Executive Director, Centre for Good Governance.
- Chen, Long, Srinidhi, Bin, Tsang, Albert. dan Yu, Wei. 2015. Audited Financial Reporting ad Voluntary Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) Reports. *SSRN Electronic Journal*.
- Cheng, Mandy M. Green, Wendy J. dan Ko, John C. 2014. The Impact of Strategic Relevance and Assurance of Sustainability Indicators on Investors' Decisions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Forthcoming.
- Cohen, Jeffrey R. dan Simneet, Roger. 2014. CSR and Assurance Service: A Research Agenda. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Forthcoming.

- Creswell. 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc
- Creswell. 2007. *Second Edition. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications. Inc
- Du, Kai dan Wu, Shing-Jen. The Credibility of Corporate Social Responsibility Reports and The Role of Assurance: Evidence from Alternative Setting. *SSRN Electronic Journal*, January 2016.
- Fatchan, H.A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif. Beserta Contoh Proposal Skripsi, Tesis dan Distertasi*. Surabaya: Penerbit Jenggala Pustaka Utama.
- Freeman, R. E. 2008. Ending the so-called ‘Friedman-Freeman’ debate,” in B. R. Agle, T. Donaldson. R. E. Freeman, M. C. Jensen, R. K. Mitchell, and D. J. Wood “*Dialogue: Toward superior stakeholder theory: Business Ethics Quarterly*, 18, 2, 153-190, halaman 162-166.
- Gray, Rob. Owen, Dave. Adam, Carol. 1995. *Accounting and Accountability*. New Jersey: Prentice Hall.
- Godfrey, Jayne. Hodgson, Allan. Tarca, Anna. Hamilton, Jane dan Holmes, Scott. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Milton: John Willey & Sons.
- Golob, Ursa, dan Barlett, Jennifer L. 2006. Communicating About Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia. *Public Relation Review* 33 (2007), halaman 1-9.
- Grunig, J. (1989). Symmetrical presuppositions as a framework for public relations theory. In C. Botan, & J. Hazleton (Eds.), *Public relations theory*. (pp. 17–44). Hillsdale, NJ: *Lawrence Erlbaum Associates*.
- GRI. 2013. *The External Assurance of Sustainability Reporting*. Global Reporting Initiative.
- Gürtürk, Anil dan Hahn, Rüdiger. 2015. An Empirical Assesment of Assurance Stetements in Sustainability Reports: Smoke Screens or Enlightening Information? *Journal of Cleaner Production* 136 (Part A), 30-41.
- Handelman, Jay M, dan Stephen J. Arnold. 1999. The Role of Marketing Actions with a Social Dimension: Appeals to the Instituional Environment. *Journal of Marketing*, 63 (Juli): 33-48.

- Herbert, Leo. 1979. *On Auditing the Performance of Management*. Lifetime Learning Publications.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawaty, dan Wardayati, Siti Maria. 2015. Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) And Islamic Social Reporting (ISR) In Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia – Social and Behavioral Science* (219) (2016) 338-343.
- IPPF. 2010. International Professional Practices Framework Februari Tahun 2010. *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.
- Kay, Alan dan Pearce, John. 2011. *Prove! Improve! Account! The New Guide to Social Accounting and Auditing*. Wolverhampton: Social Audit Network.
- Kay, Alan. 2018. *Social Impact and Challenging The 'Sacred Cow' of How Financial Accounts Are Presented*. <https://socialauditnetwork.wordpress.com/2018/02/01/social-impact-and-challenging-the-sacred-cow-of-how-financial-accounts-are-presented/> diakses tanggal 3 Juni 2018.
- Killian, Sheila dan O'Regan. 2016. Social Accounting and the Co-Creation of Corporate Legitimacy. *Accounting, Organizations and Society*. 50, pp. 1-12.
- King, Brayden dan McDonnell, Mary-Hunter. 2012. Good Firms, Good Targets: The Relationship between Corporate Social Responsibility, Reputation, and Activist Targeting. *Corporate Social Responsibility in a Globalizing World: Toward Effective Global CSR Frameworks*. Edited by Kiyoteru Tsutsui and Alwyn Lim. (Forthcoming). *SSRN Electronic Journal*.
- Koldovskyi, Artem. 2015. Corporate Responsibility Audit: Theoretical Aspects. *Risk Governance & Control: Financial Market & Institutions*. Volume 5, Issue 3.
- Kolk, Ans dan Perego, Paolo. 2010. Determinants of the Adoption of Sustainability Assurance Statements: An International Investigation. *Business Strategy and the Environment*, Vol, 19, No. 3, 2010, pp. 182-198.

- Kurihama, Ryuuichiro. 2007. Role for Auditing in Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: Under New Corporate View. *Corporate Ownership & Control. Volume 5, Issue 1.*
- Lawrence, Anne T. and Weber, James. 2017. *Business & Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy 15<sup>th</sup> Edition.* New York: McGraw-Hill.
- Lythgoe, Anne. 2018. *Social Accounting Should Be About Good Organisational Practice, Not Just A Tool For Measuring Social Value.* <https://socialauditnetwork.wordpress.com/2018/04/19/social-accounting-should-be-about-good-organisational-practice-not-just-a-tool-for-measuring-social-value/> diakses tanggal 2 Juni 2018.
- Mahajan, Pallav. 2011. A Silver Lining In The Augmenting of Public Policy: A Case Study of NREGA. *Electronic Journal of SSRN.*
- Maignan, Isabelle, dan Ralston, David A. 2002. Corporate Social Responsibility in Europe and the U.S.: Insights from Business' Self-Presentations. *Journal of International Business Studies.* Vol. 33, No. 3, halaman 497-514.
- Miwu, Rajen dan Ehili, Akepi. 2015. Social Audit in MGNREGP: A Tool for Controlling Corruption in Arunachal Pradesh. *National Seminar on Trend and Danger of Corruption in India with special reference to Arunachal Pradesh, Department of Political Science and Economic, Rajiv Gandhi University in Collaboration with ICSSR, NERC – Shillong and All Nyisi Student Union (ANSU).*
- Morimoto, R., Ash, J., dan Hope, C. 2004. Corporate Social Responsibility Audit: From Theory to Practice. *Research Papers in Management Studies of University of Cambridge.*
- Perrini, Francesco. 2005. Building a European Potrait of Corporate Social Responsibility Reporting. *European Management Journal* vol. 23, No. 6, halaman 611-627.
- Porter, M.E. dan Kramer, M.R. 2006. Strategic and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. *Harvard Business Review*, December, pp. 1-15.

- Rahim, Mia M dan Vicario Victor. 2015. Social Audit: A Mess or Means in CSR Assesment). *Springer International Publishing Switzerland*, 2015.
- Rodgers, Waymond. Choy, Helen dan Guiral-Contreras, Andreas. 2007. Independent Auditing Involment with Coporate Governance Issues. *Corporate Ownership and Control, Volume 5, Issue 1, fall 2007*.
- Sacconi, Lorenzo. 2004. Corporate Social Responsibility (CSR) as A Model of “Extended Corporate Governance. An Explanation Based On The Economic Theories of Social Contract, Reputation and Reciprocal Conforsim. *Diritto ed Economia 10*.
- Sakina, Diajeng Ade. 2014. Narsisme Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 1, No. 1*.
- Sayekti, Yosefa. 2015. Strategic Corporate Social Responsibility (CSR), Company Financial Performance, and Earning Response Coefficient: Empirical Evidence On Indonesian Listed Companies. *Procedia – Social and Behavioral Sciences 211 (2015 411 – 420*.
- Sayekti, Yosefa, dan Wondabio, L. S. 2007 Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 26-28 Juli 2007*.
- Sen, S., dan C. B. Bhattachaya. 2001. Does Doing Good Always Leadt to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. *Journal of Marketing Research*, 38 (Mei): 225-243.
- Soh, Dominic S. B. dan Martinov-Bennie, Nonna. 2015. Internal Auditors’ Perceptions of Their Role in Environmental, Social and Governance Assurance and Consulting. *Managerial Auditing Journal Vol. 30 Issue 1 pp. 80-111*.
- Suharto, Edi. 2008. *Menggagas Standar Audit Program CSR*. Dalam Round Table Discussion AAI 2008. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/menggagas-standar-audit-program-csr/> diakses Tanggal 2 Juni 2018.
- Watts, Ross L., Zimmerman, Jerold L. 1986. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## **Internet**

Darwin, Ali. 2016. Perusahaan Pembuat Laporan Keberlanjutan Kian Banyak di Indonesia. <http://swa.co.id/swa/trends/business-research/perusahaan-pembuat-laporan-keberlanjutan-kian-banyak-di-indonesia> [di akses pada 16 Desember 2016]

[www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

[www.ncsr-id.org](http://www.ncsr-id.org)

[www.nrega.ap.gov.in](http://www.nrega.ap.gov.in)

[www.san.india.org](http://www.san.india.org)

[www.socialaudit.gov.in](http://www.socialaudit.gov.in).

[www.socialauditnetwork.org.uk](http://www.socialauditnetwork.org.uk)

## Lampiran 1

### Social Audit Panel Verification Checklist

This checklist is used as an integral part of the Social Audit Panel meeting and should guide discussion about the social accounts. It is usually visited by the Panel towards the end of the Panel meeting. The three columns refer to Yes (Y), No (N) and Partially (P). The Comments column should include an explanation if an N or P is ticked – similarly if the Social Audit Panel feel the question is not applicable to this organisation, then write that in. The Comments column includes comments and recommendations for the whole of the principle.

#### A Key Principles

1	Clarify purpose	Y	N	P	Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions
1.1	Does the organisation have a clear <i>purpose</i> or mission?				
1.2	Is there an explanation of the <i>raison d’etre</i> of the organisation ie. the social or community <i>need</i> it is responding to?				
1.3	Has the organisation explained the <i>geographical context</i> in which it works?				
1.4	Is the <i>historical context</i> of the organisation and its origins explained?				
1.5	Are the <i>values</i> of the organisation clearly stated?				
1.6	Are all <i>objectives and/or activities</i> clearly stated?				
1.7	Do the social accounts demonstrate how the organisation <i>achieves the desired performance and impact</i> as expressed in the purpose or mission?				

<b>2</b>	<b>Define scope</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
2.1	Has the organisation <i>prioritised</i> its objectives (or general activities) for the purpose of these social accounts?				
2.3	Is the <i>scope</i> of what these social accounts report on clearly explained?				
2.4	Are the reasons for all <i>omissions</i> clearly explained?				
<b>3</b>	<b>Stakeholder engagement</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
3.1	Has a <i>stakeholder analysis</i> been undertaken and reported upon?				
3.2	Have any important stakeholder groups been <i>omitted</i> from that analysis (or map)?				
3.3	Is the basis on which stakeholders were <i>selected for consultation</i> clearly explained?				
3.4	Have stakeholders been consulted: a) about how the organisation lives up to its stated <i>values</i> ? b) about how well the organisation has <i>performed</i> in respect of the stated objectives or activities? c) about what <i>impacts</i> the organisation has achieved in respect of the objectives reported in the social accounts?				
3.5	Have the <i>methods</i> used to consult stakeholders been effective?				
<b>4</b>	<b>Determine materiality</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
4.1	Do the social accounts use <i>evidence</i>				

	which can be considered to be satisfactorily relevant (material)?				
4.2	Have the <i>outputs</i> and <i>outcomes</i> arising from the activities been adequately reported upon?				
4.3	Are the <i>sources</i> of quantitative (output) information used fully described and explained?				
4.4	Are the <i>methods used for consulting stakeholders</i> fully explained (including sample sizes, response rates, etc)?				
4.5	Is the data used in the social accounts adequately <i>up to date</i> ?				
4.6	Are any methods used and assumptions made for <i>calculating the monetisation</i> of impact clearly explained?				
4.7	Do the social accounts report on <i>compliance</i> with legal, statutory and regulatory bodies?				
<b>5</b>	<b>Make comparisons</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
5.1	Are year-on-year <i>targets</i> or key performance indicators described and reported on?				
5.2	Does the organisation make comparisons of its performance and impact using any appropriate <i>benchmarks and external standards</i> ?				
<b>6</b>	<b>Be transparent</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
6.1	Are the social accounts organised in an <i>understandable format</i> ?				
6.2	Will the full social accounts (including the notes of the Social Audit Panel meeting and the Social Audit Statement) be made <i>accessible</i> to stakeholders?				
6.3	Are there satisfactory plans to <i>publish</i>				

	<i>and disseminate</i> the social accounts (or a summary) to stakeholders?				
<b>7</b>	<b>Verify accounts</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
7.1	Has a <i>sample</i> of data been satisfactorily examined/traced to source?				Please list: a. b. c. d.
7.2	Were the social accounting <i>records</i> fully available and accessible to the Panel?				
7.3	Are adequate <i>data collection systems</i> in place?				

<b>8</b>	<b>Embed the process</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting this principle and main recommendations for revisions</b>
8.1	Do the social accounts report on the <i>follow-up of issues</i> raised in an earlier social reports?				
8.2	Are social accounts prepared (intended to be prepared) on a <i>regular</i> basis?				
8.3	Is there <i>evidence</i> that the practice of social accounting is embedded in the organisation?				

Some organisations may want to consider their impact using financial indicators...

<b>9</b>	<b>Monetisation of impacts</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Comments on these draft social accounts meeting monetisation and main recommendations for revisions</b> <i>[note: this section for organisations which have used</i>
----------	--------------------------------	----------	----------	----------	--

					<i>SROI calculations, Value for Money figures, Cost Benefit Analysis and other financial and economic indicators]</i>
9.1	Are the calculations used <i>clearly explained</i> ?				
9.2	Are the financial and money indicators used considered <i>reasonable</i> ?				
9.3	Are the <i>assumptions</i> which underpin the financial and money calculations clearly explained?				
9.4	Are any <i>sensitivity analyses</i> used considered to be sufficiently balanced?				

## B Key Aspects

The Key Aspects Checklist addresses how the organisation is constituted and managed. It is an integral part of the Social Accounts.

Part B checks if the six sections of the Key Aspects Checklist have been satisfactorily completed and submitted, with supporting material, as part of the social accounts.

	Comments
<b>People who work for us</b>	
<b>Governance and accountability</b>	
<b>Asset lock and use of surplus</b>	
<b>Financial sustainability</b>	
<b>Environmental sustainability</b>	
<b>Economic contribution</b>	

## C Other and concluding comments

--

## Lampiran 2. Checklist GRI

No.	INDIKATOR GRI G4	SKOR
	<b>1. Strategi dan Analisis</b>	
1.	1.1. Pernyataan dari pembuat keputusan yang paling senior di organisasi	
2.	1.2. Uraian mengenai dampak, risiko, dan peluang utama	
	<b>2. Profil Organisasi</b>	
3.	2.1. Nama organisasi	
4.	2.2. Merek, produk, dan layanan utama	
5.	2.3. Lokasi kantor pusat organisasi	
6.	2.4. Jumlah negara tempat organisasi beroperasi, dan nama negara tempat organisasi menjalankan operasi yang signifikan maupun yang secara khusus relevan dengan topik keberlanjutan yang dibahas dalam laporan	
7.	2.5. Sifat kepemilikan dan badan hukum	
8.	2.6. Pasar yang dilayani (termasuk pengelompokan geografis, sektor yang dilayani, dan jenis pelanggan dan penerima manfaat)	
9.	2.7. Skala organisasi, termasuk : jumlah total karyawan, jumlah total operasi, penjualan bersih (untuk organisasi sektor swasta) atau pendapatan bersih (untuk organisasi sektor publik), total modal yang terperinci berdasarkan utang dan ekuitas (untuk organisasi sektor swasta), dan kuantitas produk atau jasa yang disediakan	
10.	2.8. Jumlah total karyawan menurut kontrak kerja dan gender, jumlah total karyawan tetap menurut jenis pegawai dan gender, total tenaga kerja menurut pekerja dan pengawas/mandor menurut gender, total tenaga kerja menurut wilayah dan gender, jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilakukan oleh pekerja yang secara hukum dianggap sebagai wirausaha, atau oleh individu selain karyawan atau pengawas/mandor, termasuk karyawan dan karyawan kontraktor yang diawasi, dan variasi yang signifikan dalam jumlah pekerjaan (misalnya variasi pekerjaan musiman dalam industri pariwisata atau pertanian).	
11.	2.9. Persentase total karyawan yang tercakup dalam perjanjian kerja bersama	
12.	2.10. Rantai pasokan organisasi	
13.	2.11. Perubahan yang signifikan selama periode pelaporan sehubungan dengan ukuran, struktur, kepemilikan, atau rantai pasokan organisasi, termasuk: perubahan lokasi, atau perubahan di dalam operasi-operasi organisasi (termasuk pembukaan, penutupan, dan ekspansi fasilitas), perubahan dalam stuktur modal saham dan bentuk permodalan lainnya, pemeliharaan, dan perubahan operasi (untuk organisasi sektor swasta), perubahan pada lokasi pemasok, struktur rantai pasokan, atau yang berhubungan dengan pemasok, termasuk pemilihan dan keputusan hubungan	
14.	2.12. Pendekatan atau prinsip kehati-hatian dilakukan oleh organisasi	
15.	2.13. Piagam, prinsip-prinsip, atau inisiatif lainnya di bidang ekonomi ekonomi, lingkungan dan sosial, yang dikembangkan secara eksternal,	

di mana organisasi ikut serta atau memberikan dukungan

16. 2.14. Keanggotaan asosiasi (seperti asosiasi industri) dan organisasi advokasi nasional atau internasional di mana organisasi tersebut: memegang posisi di badan tata kelola, berpartisipasi dalam proyek atau komite, memberikan pendanaan yang substantif di luar biaya keanggotaan rutin, dan menganggap keanggotaan itu sebagai strategis

### **3. Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi**

17. 3.1. Semua entitas yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi organisasi atau dokumen lain yang setara dan apabila entitas yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi organisasi atau dokumen lain yang setara tidak dicakup dalam laporan
18. 3.2. Proses untuk menentukan konten laporan dan Aspek Boundary dan organisasi telah menerapkan Prinsip-prinsip Pelaporan untuk Menentukan Konten Laporan.
19. 3.3. Semua Aspek Material yang teridentifikasi dalam proses untuk menentukan konten laporan
20. 3.4. Untuk setiap Aspek Material, melaporkan Aspek Boundary dalam organisasi, sebagaimana berikut: aspek tersebut bersifat material di dalam organisasi, jika Aspek tersebut tidak material untuk semua entitas dalam organisasi (seperti yang dijelaskan dalam G4-17), pilih salah satu dari dua pendekatan berikut dan laporkan: – Daftar entitas atau kelompok entitas sebagaimana disebutkan dalam G4-17 di mana Aspek-aspek tersebut tidak menjadi material atau – Daftar entitas atau kelompok entitas yang disebutkan dalam G4-17 di mana Aspek-aspek tersebut menjadi material, serta melaporkan setiap batasan spesifik terkait dengan Aspek Boundary di dalam organisasi
21. 3.5. Untuk setiap Aspek Material, melaporkan Aspek Boundary di luar organisasi, sebagai berikut: aspek tersebut bersifat material di luar organisasi, jika Aspek tersebut adalah material di luar organisasi, identifikasi entitas, kelompok entitas atau elemen di mana Aspek-aspek tersebut menjadi material dan lokasi geografis Aspek tersebut menjadi material bagi entitas yang teridentifikasi, serta melaporkan batasan spesifik terkait dengan Aspek Boundary di luar organisasi

22. **3.6. Pengaruh dari pernyataan ulang atas informasi yang diberikan pada laporan sebelumnya dan alasan pernyataan ulang tersebut**

23. 3.7. Perubahan yang signifikan dari periode pelaporan sebelumnya pada Cakupan dan Aspek Boundary

### **4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan**

24. 4.1. Daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi
25. 4.2. Dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
26. 4.3. Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi hubungan menurut jenis dan menurut kelompok pemangku kepentingan, dan sebuah indikasi mengenai apakah terdapat hubungan yang dilakukan secara khusus dalam proses persiapan laporan



27. 4.4. Melaporkan topik dan permasalahan utama yang pernah diajukan melalui hubungan dengan pemangku kepentingan, dan bagaimana organisasi menanggapi topik dan permasalahan utama tersebut, termasuk melalui pelaporan ini. Laporkan kelompok pemangku kepentingan yang pernah mengajukan topik dan permasalahan utama.

## 5. Profil Laporan

28. 5.1. Periode pelaporan (misalnya tahun fiskal atau tahun kalender) untuk informasi yang diberikan
29. 5.2. Tanggal laporan sebelumnya yang paling terakhir (jika ada)
30. 5.3. Siklus pelaporan (misalnya tahunan, dua tahunan)
31. 5.4. Kontak yang dapat dihubungi bila ada pertanyaan mengenai laporan atau kontennya
32. 5.5. Melaporkan opsi 'sesuai' yang dipilih organisasi, melaporkan Indeks Konten GRI untuk opsi yang dipilih, melaporkan referensi ke Laporan Assurance eksternal, jika laporan telah dijamin secara eksternal. GRI merekomendasikan penggunaan assurance eksternal, namun hal ini bukan persyaratan agar dapat 'sesuai' dengan Pedoman.
33. 5.6. Melaporkan kebijakan organisasi dan praktik yang sedang berjalan sehubungan dengan memperoleh assurance eksternal untuk laporan, jika tidak disertakan dalam laporan assurance yang menyertai laporan keberlanjutan, laporkan cakupan dan dasar assurance eksternal yang diberikan, melaporkan hubungan antara organisasi dan penyedia assurance, dan melaporkan apakah badan tata kelola tertinggi atau eksekutif senior terlibat dalam memperoleh assurance untuk laporan keberlanjutan organisasi.

## 6. Tata Kelola

34. 6.1. Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite-komite badan tata kelola tertinggi. Identifikasi komite yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
35. 6.2. Proses pelimpahan otoritas untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan karyawan lainnya
36. 6.3. Organisasi telah menetapkan jabatan atau jabatan-jabatan di tingkat eksekutif dengan tanggung jawab untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan apakah pemegang jabatan melapor langsung kepada badan tata kelola tertinggi
37. 6.4. Proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi tentang topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika proses konsultasi didelegasikan, jelaskan kepada siapa dan masukanmasukan mana yang diproses kepada badan tata kelola tertinggi
38. 6.5. Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitennya menurut: Eksekutif atau non-eksekutif, Independensi, Masa jabatan di badan tata kelola • Jumlah posisi dan komitmen lain yang signifikan dari setiap individu dan sifat komitmen tersebut, Gender, Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili, Kompetensi bagi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial

dan Perwakilan pemangku kepentingan

39. 6.6. Pimpinan badan tata kelola tertinggi juga merupakan pejabat eksekutif (dan, jika ya, apa fungsinya dalam manajemen organisasi dan alasan untuk pengaturan ini)
40. 6.7. Proses pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi dan komite-komitennya, dan kriteria yang digunakan untuk mencalonkan dan memilih anggota badan tata kelola tertinggi, termasuk: Apakah dan bagaimana keberagaman dipertimbangkan, Apakah dan bagaimana independensi dipertimbangkan, Apakah dan bagaimana keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dipertimbangkan, dan Apakah dan bagaimana pemangku kepentingan (termasuk pemegang saham) dilibatkan
41. 6.8. Proses pada badan tata kelola tertinggi untuk memastikan konflik kepentingan dihindari dan dikelola serta melaporkan apakah konflik kepentingan diungkapkan kepada pemangku kepentingan, termasuk, setidaknya: • Keanggotaan lintas dewan, Lintas kepemilikan saham dengan pemasok dan pemangku kepentingan lain, Keberadaan pemegang saham pengendali, serta Pengungkapan tentang pihak yang berelasi
42. 6.9. Peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dalam pengembangan, persetujuan, dan pembaruan tujuan, pernyataan nilai atau misi, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
43. 6.10. Tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
44. 6.11. Melaporkan proses untuk evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Melaporkan apakah evaluasi tersebut independen atau tidak, dan frekuensinya. Melaporkan apakah evaluasi tersebut merupakan asesmen yang dilakukan sendiri dan melaporkan tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi terkait dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk, setidaknya, perubahan dalam keanggotaan dan praktik di tingkat organisasi
45. 6.12. Peran badan tata kelola tertinggi dalam identifikasi dan pengelolaan dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaksanaan proses uji tuntas dan melaporkan apakah konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk mendukung identifikasi dan manajemen oleh badan tata kelola tertinggi mengenai dampak, risiko, serta peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial
46. 6.13. Peran badan tata kelola tertinggi dalam meninjau keefektifan proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
47. 6.14. Frekuensi revidi badan tata kelola tertinggi mengenai dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial
48. 6.15. Komite atau posisi tertinggi yang secara resmi meninjau dan

menyetujui laporan keberlanjutan organisasi dan memastikan bahwa semua Aspek Material tercakup

49. 6.16. Proses penyampaian permasalahan penting kepada badan tata kelola tertinggi

50. 6.17. Sifat dan jumlah total permasalahan penting yang dikomunikasikan kepada badan tata kelola tertinggi dan mekanisme yang digunakan untuk membahas dan menyelesaikannya

51. 6.18. Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk jenis remunerasi di bawah ini: 1)Gaji tetap dan gaji tidak tetap: Gaji berbasis kinerja, Gaji berbasis ekuitas, Bonus, Saham tangguhan atau saham vested (hak karyawan), 2)Bonus kontrak atau pembayaran insentif perekrutan, 3)Pembayaran PHK, 4)Clawback, 5)Tunjangan pensiun, termasuk perbedaan antara skema tunjangan dan tingkat kontribusi bagi badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan semua karyawan lainnya. Serta melaporkan bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi berkaitan dengan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior

52. 6.19. Proses untuk menentukan remunerasi, melaporkan apakah konsultan remunerasi dilibatkan dalam penentuan remunerasi dan apakah mereka terpisah dari manajemen, serta melaporkan hubungan lainnya yang dimiliki konsultan remunerasi dengan organisasi

53. 6.20. Pandangan pemangku kepentingan diminta dan dipertimbangkan terkait dengan remunerasi, termasuk hasil pemungutan suara pada kebijakan dan usulan remunerasi, jika berlaku.

54. 6.21. Rasio total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi dalam organisasi di setiap negara dari operasi yang signifikan terhadap median peningkatan total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi) di negara yang sama

55. 6.22. Rasio peningkatan persentase dalam total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi dalam organisasi di setiap negara dari operasi yang signifikan terhadap peningkatan persentase median dalam total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi) di negara yang sama

#### 7. Etika dan Integritas

56. 7.1. Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi seperti pedoman perilaku dan kode etik

57. 7.2. Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan tentang perilaku etis dan sah menurut hukum, dan perkara yang berkaitan dengan integritas organisasi, seperti saluran bantuan atau saluran saran

58. 7.3. Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan masalah terkait perilaku tidak etis dan melanggar hukum, dan masalah yang berkaitan dengan integritas organisasi, seperti eskalasi melalui manajemen lini, mekanisme pengungkapan, atau hotline

## 8. Pengungkapan Pendekatan Manajemen

59. DMA. Melaporkan mengapa Aspek tersebut material. Melaporkan dampak yang membuat Aspek ini material dan melaporkan cara organisasi mengatur Aspek Material atau dampak dari Aspek tersebut serta melaporkan evaluasi pendekatan manajemen, termasuk: Mekanisme untuk mengevaluasi keefektifan pendekatan manajemen yang dilakukan, Hasil evaluasi pendekatan manajemen, Perubahan-perubahan yang dilakukan terkait dengan pendekatan manajemen

## Indikator Berdasarkan Aspek : EKONOMI

### A. Kinerja Ekonomi

60. EC1. Melaporkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (Economic Value Generated & Distributed - EVG&D) dengan basis akrual termasuk komponen dasar untuk pengoperasian global organisasi dan untuk menilai dampak ekonomi lokal dengan lebih baik, laporkan EVG&D secara terpisah pada tingkat negara, regional, atau pasar yang signifikan serta melaporkan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi
61. EC2. Melaporkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di mana terdapat potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, pendapatan, atau pengeluaran, termasuk: Uraian risiko atau peluang dan klasifikasinya misalnya fisik, peraturan, atau lainnya, Uraian tentang dampak terkait dengan risiko atau peluang, Implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil, Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang, dan Biaya yang timbul dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mengelola risiko atau peluang
62. EC3. Bila kewajiban-kewajiban yang direncanakan yang dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi, laporkan taksiran nilai kewajiban tersebut. Bila terdapat sumber dana terpisah untuk membayar kewajiban rencana pensiun, laporkan: Sejauh mana skema kewajiban-kewajiban tersebut diestimasi dapat dibayarkan dengan aset yang disisihkan untuk membayarnya, Dasar yang dijadikan landasan estimasi tersebut, Kapan estimasi tersebut dibuat. Bila dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban rencana pensiun tidak sepenuhnya dapat ditanggung, jika ada, jelaskan strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memastikan agar sepenuhnya dapat ditanggung, dan skala waktu, jika ada, yang diharapkan perusahaan untuk dapat mencapai pertanggung jawaban penuh. Melaporkan persentase gaji yang dikontribusikan, menurut karyawan atau pemberi kerja. Melaporkan tingkat partisipasi pada rencana pensiun (misalnya partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema berdasarkan negara atau regional, atau skema dengan dampak finansial)
63. EC4. Melaporkan nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah selama periode pelaporan, termasuk, setidaknya: Keringanan pajak dan kredit pajak, Subsidi, Bantuan investasi, bantuan penelitian dan pengembangan, dan jenis bantuan lainnya yang relevan, Penghargaan & Pembebasan

pembayaran royalti, Bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (Export Credit Agencies - ECAs), Insentif finansial, Tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah untuk operasi apapun. Melaporkan informasi di atas berdasarkan negara. Melaporkan apakah, dan sejauh mana, pemerintah ada dalam struktur pemegang saham

## ***B. Keberadaan di Pasar***

64. EC5. Bila sebagian besar tenaga kerja dibayar berdasarkan upah yang harus mematuhi aturan upah minimum, laporkan rasio upah pegawai pemula (entry level) terhadap upah minimum berdasarkan gender di lokasi-lokasi operasi yang signifikan. Melaporkan jika aturan upah minimum regional tidak berlaku atau bervariasi di lokasi-lokasi operasi yang signifikan, berdasarkan gender. Dalam keadaan memaksa di mana angka minimum yang berbeda-beda dapat digunakan sebagai acuan, laporkan angka minimum yang digunakan. Melaporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'

65. EC6. Melaporkan persentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan. Melaporkan definisi 'manajemen senior' yang digunakan. Melaporkan definisi geografis organisasi tentang 'lokal'. Melaporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

## ***C. Dampak Ekonomi Tidak Langsung***

66. EC7. Melaporkan sejauh mana pembangunan investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan signifikan. Melaporkan dampak saat ini atau yang diperkirakan pada masyarakat dan ekonomi lokal. Melaporkan dampak positif dan negatif bila relevan. Melaporkan apakah investasi dan jasa tersebut merupakan keterlibatan komersial, natura, atau secara cuma-cuma.

67. EC8. Contoh dampak ekonomi tidak langsung positif dan negatif signifikan yang teridentifikasi dimiliki organisasi dan tingkat signifikansi dampak dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, serta agenda kebijakan

## ***D. Praktik Pengadaan***

68. EC9. Melaporkan persentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan yang dibelanjakan pada pemasok lokal pada operasi yang dimaksud (seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal). Melaporkan definisi geografis organisasi tentang 'lokal'. Melaporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'

## **Indikator Berdasarkan Aspek : LINGKUNGAN**

### ***A. Bahan***

69. EN1. Melaporkan berat atau volume total bahan yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan, berdasarkan: Bahan tak terbarukan yang digunakan dan Bahan terbarukan yang digunakan

70. EN2. Melaporkan persentase bahan input berupa bahan daur ulang yang digunakan untuk pembuatan produk dan jasa utama perusahaan

**B. Energi**

71. EN3. Melaporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Melaporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber bahan bakar terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Melaporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: Konsumsi listrik, Konsumsi pemanas, Konsumsi pendingin, Konsumsi uap. Melaporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: Listrik yang dijual, Pemanas yang dijual, Pendingin yang dijual, dan Uap yang dijual. Melaporkan konsumsi energi total dalam satuan joule atau kelipatannya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

72. EN4. Energi yang dikonsumsi di luar organisasi, dalam satuan joule atau kelipatannya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

73. EN5. Melaporkan rasio intensitas energi. Melaporkan metrik yang spesifik organisasi (penyebut rasio) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut. Melaporkan jenis energi yang dicakup dalam rasio intensitas: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, uap, atau seluruhnya. Melaporkan apakah rasio memperhitungkan energi yang dikonsumsi di dalam organisasi, di luar organisasi, atau keduanya.

74. EN6. Jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai yang merupakan hasil langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi, dalam satuan joule atau kelipatannya. Melaporkan jenis energi yang termasuk dalam pengurangan: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap. Melaporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

75. EN7. Melaporkan pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa yang dijual, yang dicapai selama periode pelaporan, dalam satuan joule atau kelipatannya. Melaporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

**C. Air**

76. EN8. Melaporkan total volume pengambilan air dari sumber berikut ini: Air permukaan, termasuk air dari rawa, sungai, danau, dan laut, Air tanah, Air hujan yang dikumpulkan secara langsung dan disimpan oleh organisasi, Air limbah dari organisasi lain, Pasokan air kota atau perusahaan air lainnya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

77. EN9. Melaporkan jumlah total sumber air yang secara signifikan

terkena dampak pengambilan air berdasarkan jenis: Ukuran sumber air, Apakah sumber tersebut merupakan kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak, Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemik, jumlah spesies yang dilindungi), Nilai atau pentingnya sumber air terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

78. EN10. Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali oleh organisasi. Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali dalam persentase total pengambilan air yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN8. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

***D. Keanekaragaman Hayati***

79. EN11. Melaporkan informasi berikut untuk setiap lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung: Lokasi geografis, Lahan di bawah permukaan dan bawah tanah yang mungkin dimiliki, disewa, atau dikelola oleh

organisasi, Posisi dalam hubungannya dengan kawasan lindung (di dalam, berdekatan dengan, atau terdapat bagian dari kawasan lindung) atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, Jenis operasi (kantor, pabrik atau produksi, atau pertambangan), Ukuran lokasi operasional dalam satuan km<sup>2</sup>, Nilai keanekaragaman hayati dicirikan berdasarkan: Atribut kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar

kawasan lindung (ekosistem darat, air tawar, atau laut) dan Penetapan status perlindungan (seperti IUCN Protected Area Management Categories, Konvensi Ramsar, peraturan nasional)

80. EN12. Melaporkan sifat dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada keanekaragaman hayati yang dikaitkan pada satu atau beberapa dari hal berikut ini: Pembangunan atau penggunaan pabrik produksi, tambang, dan infrastruktur transportasi, Polusi (masuknya zat-zat yang tidak secara alamiah terjadi dalam habitat dari titik tertentu dan non-titik), Masuknya spesies pengganggu, hama, dan wabah penyakit, Berkurangnya spesies, Perubahan habitat, Perubahan proses ekologis di luar jangkauan variasi alam (seperti salinitas atau perubahan tinggi air tanah). Melaporkan dampak positif dan negatif, langsung dan tidak langsung, yang signifikan dengan referensi sebagai berikut: Spesies yang terkena dampak, Luasan kawasan terkena dampak, Durasi dampak, Keterpulihan atau ketidakpulihan dampak

81. EN13. Melaporkan ukuran dan lokasi semua kawasan habitat yang dilindungi atau kawasan yang dipulihkan, dan apakah keberhasilan tindakan pemulihan telah atau disetujui oleh ahli independen eksternal. Melaporkan apakah ada kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau memulihkan kawasan habitat yang berbeda

dari lokasi yang diawasi organisasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemulihan dan perlindungan. Melaporkan status dari setiap kawasan berdasarkan kondisinya pada penutupan periode pelaporan. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

82. EN14. Melaporkan jumlah spesies IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di wilayah yang dipengaruhi oleh operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan: Kritis (critically endangered), Genting (endangered), Rentan (vulnerable), Hampir terancam (near threatened), dan Berisiko rendah (least concern)

#### *E.Emisi*

83. EN15. Melaporkan emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1) dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub>, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. Melaporkan gas yang diperhitungkan dalam kalkulasi (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>, atau seluruhnya). Melaporkan emisi CO<sub>2</sub> biogenik dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub> terpisah dari emisi bruto GRK langsung. Melaporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP. Melaporkan pendekatan pengkonsolidasian yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional).
84. EN16. Melaporkan emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) dari energi bruto dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub>, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. Melaporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. Melaporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia. Melaporkan pendekatan konsolidasi yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional)
85. EN17. Melaporkan emisi bruto GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub>, tidak termasuk emisi tidak langsung dari dihasilkan dari listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dibeli atau diperoleh yang digunakan perusahaan (emisi tidak langsung ini dilaporkan dalam Indikator G4- EN16). Kecualikan perdagangan GRK apa pun, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. Melaporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. Melaporkan emisi CO<sub>2</sub>



biogenik dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub> terpisah dari emisi GRK bruto tidak langsung (Cakupan 3) lainnya. Melaporkan kategori emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dan aktivitas yang diperhitungkan dalam kalkulasi. Melaporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia

86. EN18. Melaporkan rasio intensitas emisi GRK. Melaporkan metrik khusus organisasi (rasio penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut. Melaporkan jenis emisi GRK yang termasuk dalam rasio intensitas: langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), tidak langsung lainnya (Cakupan 3). Melaporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan.
87. EN19. Melaporkan jumlah pengurangan emisi GRK yang dicapai sebagai hasil langsung inisiatif pengurangan emisi, dalam satuan metrik ton setara CO<sub>2</sub>. Melaporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>, atau seluruhnya). Melaporkan tahun dasar atau garis dasar yang dipilih serta alasan pemilihannya. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan apakah pengurangan emisi GRK terjadi dalam emisi langsung (Cakupan 1), emisi energi tidak langsung (Cakupan 2), emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
88. EN20. Melaporkan produksi, impor, dan ekspor bahan perusak ozon (BPO) dalam satuan metrik ton setara CFC-11. Melaporkan bahan-bahan yang termasuk dalam penghitungan. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan.
89. EN21. Melaporkan jumlah emisi udara yang signifikan, dalam satuan kilogram atau kelipatannya untuk setiap hal berikut: NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, Pencemar organik persisten (POP), Senyawa organik volatil (VOC), Pencemar udara berbahaya (HAP), Debu (PM), Kategori emisi udara standar lainnya yang diidentifikasi dalam peraturan yang relevan. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Melaporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan.

## ***F. Efluen dan Limbah***

90. EN22. Melaporkan volume total air terencana dan tidak terencana yang dibuang berdasarkan: Tujuan, Kualitas air termasuk metode penanganan, Apakah digunakan kembali oleh organisasi lain atau tidak. Melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
91. EN23. Melaporkan bobot total limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dengan metode pembuangan sebagai berikut: Penggunaan kembali, Daur ulang, Pengomposan, Pemulihan, termasuk pemulihan energi, Pembakaran (pembakaran massa), Injeksi sumur dalam, Tempat pembuangan akhir (TPA), Penyimpanan di tempat, Lainnya

(ditentukan oleh organisasi). Melaporkan bagaimana metode pembuangan limbah ditentukan: Dibuang langsung oleh organisasi atau jika tidak, dikonfirmasi secara langsung, Informasi yang diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah, dan Standar organisasi untuk kontraktor pembuangan limbah

92. EN24. Melaporkan jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. Untuk tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan informasi tambahan berikut untuk setiap kejadian tumpahan tersebut: Lokasi tumpahan, Volume tumpahan, Bahan yang tumpah, dikategorikan menurut: Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air), Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air), Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air), Tumpahan zat kimia (sebagian besar permukaan tanah atau air), Lainnya (ditentukan oleh organisasi). Melaporkan dampak tumpahan yang signifikan.
93. EN25. Melaporkan bobot total untuk tiap-tiap hal berikut ini: Limbah berbahaya yang diangkut, Limbah berbahaya yang diimpor, Limbah berbahaya yang diekspor, Limbah berbahaya yang diolah. Melaporkan persentase limbah berbahaya yang dikirimkan internasional
94. EN26. Melaporkan badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak air buangan berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada bagian Penyusunan di bawah ini, dengan menambahkan informasi tentang: Ukuran badan air dan habitat terkait, Apakah badan air dan habitat terkait merupakan sebagai kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak, dan Nilai keanekaragaman hayati (seperti jumlah total spesies yang dilindungi)

## ***G. Produk dan Jasa***

95. EN27. Melaporkan secara kuantitatif sejauh mana dampak lingkungan dari produk dan jasa yang telah dimitigasi selama periode pelaporan. Jika menggunakan angka-angka yang dikaitkan pada penggunaan, laporkan asumsi dasar yang dipakai terkait pola konsumsi atau faktor normalisasi.
96. EN28. Melaporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasikan untuk setiap kategori produk. Melaporkan bagaimana data untuk Indikator ini diperoleh.

## ***H. Kepatuhan***

97. EN29. Melaporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dalam bentuk: Nilai moneter total dari denda yang signifikan, Jumlah total sanksi non-moneter, Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Bila organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

## ***I. Transportasi***

98. EN30. Laporkan dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja. Jika data kuantitatif tidak

diberikan, laporkan alasannya. Melaporkan bagaimana dampak lingkungan dari pengangkutan produk, tenaga kerja organisasi, dan barang serta bahan lainnya dikurangi. Melaporkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan mana dampak lingkungan yang signifikan.

***J. Lain-lain***

- 99.** EN31. Melaporkan total pengeluaran perlindungan lingkungan berdasarkan: Biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi, dan Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan

***K. Asesmen Pemasok Atas Lingkungan***

- 100.** EN32. Melaporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan

- 101.** EN33. Melaporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan. Melaporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan. Melaporkan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial yang teridentifikasi pada rantai pasokan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

***L. Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan***

- 102.** EN34. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: Ditangani selama periode pelaporan, Diselesaikan selama periode pelaporan. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan

---

**Indikator Berdasarkan Aspek : SOSIAL**

**Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja**

***A. Pekerjaan***

- 103.** LA1. Melaporkan jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah. Melaporkan jumlah total dan tingkat turnover karyawan selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah.

- 104.** LA2. Melaporkan tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purnawaktu dari organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Hal ini mencakup, setidaknya: Asuransi jiwa, Asuransi kesehatan, Perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan, Cuti melahirkan, Pemberian pensiun, Kepemilikan saham, dan Lainnya. Melaporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang

signifikan?.

105. LA3. Melaporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan, menurut gender. Melaporkan jumlah total karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender. Melaporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, menurut gender. Melaporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir yang masih dipekerjakan dua belas bulan setelah mereka kembali bekerja, menurut gender. Melaporkan tingkat karyawan yang kembali bekerja dan tingkat retensi karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender.

***B. Hubungan Industrial***

106. LA4. Melaporkan berapa minggu waktu minimum yang biasanya diberikan untuk pemberitahuan perubahan kepada karyawan dan perwakilan terpilih sebelum penerapan perubahan operasional signifikan yang dapat memengaruhi mereka secara substansial. Untuk organisasi dengan perjanjian kerja bersama, laporkan apakah masa pemberitahuan dan ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi telah dicantumkan dalam perjanjian bersama.

***C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja***

107. LA5. Melaporkan pada tingkat mana setiap komite bersama formal manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan biasanya berjalan dalam organisasi. Melaporkan persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja kesehatan dan keselamatan.

108. LA6. Melaporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk total tenaga kerja (yaitu, jumlah karyawan ditambah pengawas/mandor), berdasarkan: Wilayah dan Gender. Melaporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk kontraktor independen yang bekerja di lokasi kerja yang keselamatan kerjanya menjadi tanggung jawab organisasi, berdasarkan: Wilayah dan Gender. Melaporkan sistem aturan yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan.

109. LA7. Melaporkan apakah ada pekerja yang dalam kegiatan kerja yang sering terkena, atau berisiko tinggi terkena, penyakit tertentu.

110. LA8. Melaporkan apakah perjanjian formal (baik lokal atau global) dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan keselamatan. Jika ya, laporkan sejauh mana, dalam persentase, berbagai topik kesehatan dan keselamatan dicakup oleh perjanjian ini.

***D. Pelatihan dan Pendidikan***

111. LA9. Laporkan jam pelatihan rata-rata yang telah diambil oleh karyawan organisasi selama periode pelaporan menurut: Gender dan Kategori karyawan

112. LA10. Melaporkan jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan

---

**keterampilan karyawan. Melaporkan program bantuan transisi yang diberikan untuk memfasilitasi keberlanjutan kerja dan pengelolaan purna bakti akibat pensiun atau pemutusan hubungan kerja.**

- 113.** LA11. Melaporkan persentase karyawan total berdasarkan gender dan berdasarkan kategori karyawan yang mendapat reviu kinerja rutin dan pengembangan karir selama periode pelaporan.

***E. Keberagaman dan Kesetaraan Peluang***

- 114.** LA12. Melaporkan persentase individu-individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut: Gender, Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun, Kelompok minoritas, Indikator keberagaman lainnya bila relevan. Melaporkan persentase karyawan per kategori karyawan di setiap kategori keberagaman berikut: Gender, Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun, Kelompok minoritas, Indikator keberagaman lainnya bila relevan

***F. Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki***

- 115.** LA13. Melaporkan rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki untuk setiap kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Melaporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

***G. Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan***

- 116.** LA14. Melaporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.

- 117.** LA15. Melaporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak untuk praktik ketenagakerjaan. Melaporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan. Melaporkan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

***H. Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan***

- 118.** LA16. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: Ditangani selama periode pelaporan, Diselesaikan selama periode pelaporan. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.
-

Hak Asasi Manusia

**A. Investasi**

119. HR1. Melaporkan jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia. Melaporkan definisi ‘perjanjian investasi yang signifikan’ yang digunakan oleh organisasi.
120. HR2. Melaporkan jumlah total waktu dalam periode pelaporan yang digunakan untuk pelatihan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasional. Melaporkan persentase karyawan dalam periode pelaporan yang dilatih mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi.

**B. Non-Diskriminasi**

121. HR3. Melaporkan jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan. Melaporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada hal-hal berikut: Insiden yang ditinjau oleh organisasi, Rencana remediasi yang sedang diterapkan, Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu manajemen rutin, Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak

**C. Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama**

122. HR4. Laporkan operasi dan pemasok di mana hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perjanjian kerja bersama mungkin dilanggar atau berisiko tinggi untuk dilanggar baik dalam hal: Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok, Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko. Melaporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama.

**D. Pekerja Anak**

123. HR5. Melaporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko besar atas terjadinya eksploitasi: Pekerja anak, Pekerja muda yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya. Melaporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja anak baik dalam hal: Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok, dan Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko. Melaporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.

**E. Pekerja Paksa atau Wajib Kerja**

124. HR6. Melaporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja paksa atau wajib kerja baik dalam hal: Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok, Negara atau

area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko. Melaporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.

#### ***F. Praktik Pengamanan***

- 125.** HR7. Melaporkan persentase petugas pengamanan yang telah menerima pelatihan formal mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur tertentu di organisasi dan penerapannya pada pengamanan. Melaporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas pengamanan.

#### ***G. Hak Adat***

- 126.** HR8. Melaporkan jumlah total insiden pelanggaran yang diidentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. Melaporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada: Insiden yang ditinjau oleh organisasi, Rencana remediasi yang sedang diterapkan, Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu manajemen rutin, Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak

#### ***H. Asesmen***

- 127.** HR9. Melaporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.

#### ***I. Asesmen Pemasok atas HAM***

- 128.** HR10. Melaporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
- 129.** HR11. Melaporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen terkait dampak hak asasi manusia. Melaporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Melaporkan dampak negatif aktual dan potensial hak asasi manusia signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

#### ***J. Mekanisme Pengaduan Masalah HAM***

- 130.** HR12. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme pengaduan formal selama periode pelaporan. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: Ditangani selama periode pelaporan, Diselesaikan selama periode pelaporan. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan sebelum periode

pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

Masyarakat

**A. Masyarakat Lokal**

- 131.** SO1. Melaporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan, termasuk penggunaan: Asesmen dampak sosial, termasuk asesmen dampak gender, berdasarkan pada proses partisipasi, Asesmen dampak lingkungan dan pemantauan berkelanjutan, Pengungkapan publik atas hasil asesmen dampak lingkungan dan sosial, Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal, Rencana pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan, Komite konsultasi masyarakat lokal berbasis luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan, Dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan lainnya untuk menangani dampak, Proses pengaduan formal masyarakat lokal
- 132.** SO2. Melaporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk: Lokasi operasi dan Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan dari operasi  
*B. Anti Korupsi*
- 133.** SO3. Melaporkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi. Melaporkan risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui asesmen risiko.
- 134.** SO4. Melaporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut wilayah. Melaporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah. Melaporkan jumlah total dan persentase mitra bisnis yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah. Melaporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut wilayah. Melaporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah.
- 135.** SO5. Melaporkan jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Melaporkan jumlah total insiden terbukti di mana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi. Melaporkan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis yang diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi. Melaporkan kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.



---

**C. Kebijakan Publik**

136. SO6. Melaporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi menurut negara dan penerima/penerima manfaat. Melaporkan cara memperkirakan nilai finansial dari kontribusi non-finansial, jika ada.

**D. Anti Persaingan**

137. SO7. Melaporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta. Melaporkan hasil utama dari tindakan hukum yang diselesaikan, termasuk setiap keputusan atau pertimbangan

**E. Kepatuhan**

138. SO8. Melaporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dari segi: Nilai moneter total dari denda yang signifikan, Jumlah total sanksi non-moneter, Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. Melaporkan konteks atas denda dan sanksi non-moneter yang signifikan yang terjadi.

**F. Asesmen Pemasok atas Dampak Masyarakat**

139. SO9. Melaporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat.
140. SO10. Melaporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen untuk dampak terhadap masyarakat. Melaporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat. Melaporkan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Melaporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

**G. Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat**

141. SO11. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: Ditangani selama periode pelaporan, Diselesaikan selama periode pelaporan. Melaporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.
-

## Tanggung Jawab atas Produk

### ***A. Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan***

142. PR1. Melaporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya telah dinilai untuk ditingkatkan
143. PR2. Melaporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, menurut: Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti, Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan, Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

### ***B. Pelabelan Produk dan Jasa***

144. PR3. Melaporkan apakah informasi produk dan jasa berikut diharuskan berdasarkan prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa. Melaporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dicakup oleh dan dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur tersebut.
145. PR4. Mengidentifikasi jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut: Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti, Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan peringatan, Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.
146. PR5. Melaporkan hasil atau kesimpulan utama dari survei kepuasan pelanggan (berdasarkan ukuran sampel yang relevan secara statistik) yang dilakukan dalam periode pelaporan terkait dengan informasi tentang: Organisasi secara keseluruhan, Kategori produk atau jasa utama, Lokasi operasi yang signifikan

### ***C. Komunikasi Pemasaran***

147. PR6. Melaporkan apakah organisasi menjual produk yang: Dilarang di pasar tertentu dan Menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat publik. Melaporkan cara organisasi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mengenai produk tersebut.
148. PR7. Melaporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut: Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti, Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan, Insiden ketidakpatuhan terhadap aturan sukarela. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap

peraturan dan koda sukarela pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

***D. Privasi Pelanggan***

- 149.** PR8. Melaporkan jumlah total keluhan yang terbukti yang diterima tentang pelanggaran privasi pelanggan, yang dikategorikan menurut: Keluhan yang diterima dari pihak luar dan terbukti terkait dengan organisasi, Keluhan dari badan regulator. Melaporkan jumlah total kebocoran, pencurian, atau hilangnya data pelanggan yang teridentifikasi. Jika organisasi tidak mengidentifikasi keluhan yang terbukti, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

***E. Kepatuhan***

- 150.** PR9. Melaporkan total nilai moneter dari denda yang signifikan untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

**TOTAL SKOR**

---

**Lampiran 3**

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. *How is the growth of CSR in those countries?*
2. *What is social audit?*
3. *Do you agree with social audit dealing with auditing of CSR report?*
4. *Why do we need social audit?*
5. *What is the background of social audit implementation of those countries?*
6. *How's the practice of social audit in those countries respectively?*
7. *How to implement social audit?*
8. *Is there any regulation from the government regarding social audit?*
9. *Who is worth to conduct social audit?*
10. *Do those countries have standar or guidance for social audit?*
11. *Is there any pros and cons of social audit in those countries?*
12. *What's their opinion to build a development concept of social audit in Indonesia?*

Lampiran 4

Screenshot Percakapan Wawancara dengan Informan

1. Percakapan Wawancara dengan Mr. Alan Greig



**COMPOSE**

Inbox (110)

Starred

Sent Mail

Drafts (8)

More labels -

Bayu - +

No recent chats  
Start a new one

Also, we have a focus – as does social accounting – on building/re-generating social capital (which is being driven out by the dominance of financial capital).

On these issues, you will find some interest in the attached study above on the relationship between SROI and SAA, done by SAN UK in association with SROI UK.

With regard to what social accounting is and does, you might find some interest in the principles attached below (Attachment 1) for your research (based on the original model developed by Freer Spreckley in 1981 – Spreckley being the 'inventor' of the term social enterprise at that time).

There is a substantial body of evidence building up that this is the way to go – especially the issue of putting 'sustainability' over impact. Not much use having a high impact/CSR rating if you are 'technically insolvent' – this would be grossly misleading to potential social investors in our view.

FWI also, some doodling I did on the topic a couple of years ago – see attachment 2.

All the best with the project

Alan Greig  
Mercury Cooperative

Attachment 1.

As Spreckley hoped, the idea has evolved to the point that we can say this about SAA.

- It is about sustainability not managing and measuring short-term results.
- It is stakeholder and values driven
- It sees organisational form as being important
- It is about reporting broad impact
- It verifies against principles, standards and processes rather than being focussed on activities.
- It sees measuring as key to wider process improvement and broader understanding rather than being an end in itself.
- It is about past and current performance
- It is about both proving (through the audit process) and improving (through results and targets)
- It has the aim of being simple, producing social accounts i.e. non-financial; it highlights benefits to stakeholders; and supports self-help and the empowerment model.
- It can (and should) be built into management processes to be done internally rather than needing an external consultant
- It is good for comparisons across the sector if some objectives are shared
- It considers the "variables" beyond the control of the organization
- It considers outcomes that are hard to measure such as building social capital and community well-being

Attachment 2. Background to difference between SROI and SAA

1. SAA arose out of the coop and community business sectors, SROI arose out of the corporate sector.
2. SROI is about making the community accountable to business, SAA is about the reverse.
3. SAA is about sustainability, SROI is about managing and measuring short-term results.
4. SAA is stakeholder and values driven, SROI is funder/investor driven
5. SAA sees organisational form as being important, SROI doesn't rate organisational form.
6. SROI focusses on financial proxies, SAA does not
7. SAA demonstrates impact, SROI attempts to measure it, ie: SROI is about producing numbers, SAA is about reporting broad impact
8. SAA verifies against principles, standards and processes, SROI is more focussed on activities.
9. SAA sees measuring as key to wider process improvement and broader understanding, SROI sees measurement as an end in itself.
10. SROI is used to forecast, SAA focuses on past and current performance
11. SAA is focused on both proving (through the audit process) and improving (through results and targets), SROI has a more limited audit process
12. SROI produces an SROI Report, SAA produces "social accounts"
13. SROI monetises the "return to investors", SAA highlights benefits to stakeholders
14. SROI is a "social control" model, SAA supports the "empowerment" model.
15. SROI is costly and complex, SAA is simpler and more effective.
16. SAA can be built into management processes so you can do it yourself, SROI almost always needs an external consultant
17. SAA is good for comparisons across the sector if some objectives are shared, SROI can only be used for comparing over time progress within the one project.
18. SAA supports self-help, SROI imposes a formalised approach.
19. SAA considers the "variables" beyond the control of the organisation, SROI counts only what can be attributed to the organisation.
20. SAA considers outcomes that are hard to measure such as building social capital and community well-being, SROI only considers outcomes to which it can attribute a "value".
21. SAA considers outputs are important, SROI less so.
22. SAA provides a statement more broadly on what is being done, SROI only on selected activities.

From: Bayu Aprilianto [mailto:mr.aprilianto@gmail.com]  
Sent: Monday, 30 April 2018 4:58 PM  
To: Alan Greig <alan.greig@mercury.org.au>  
Subject: Re: Social Audit Inquiry from Indonesia

---

**Alan Greig** <alan.greig@mercury.org.au> to me

Hi Bayu

Just to let you know that Pro Bono News in Australia has this morning published this blog piece from my colleague, Alan Kay (of the Social Accounting Network, based in the UK) under the heading "Resurrecting a Positive Role for the Much-maligned Notion of 'Social Capital'".

You can see it at: <https://probonoaustralia.com.au/news/2018/05/resurrecting-positive-role-much-maligned-notion-social-capital>

Good article

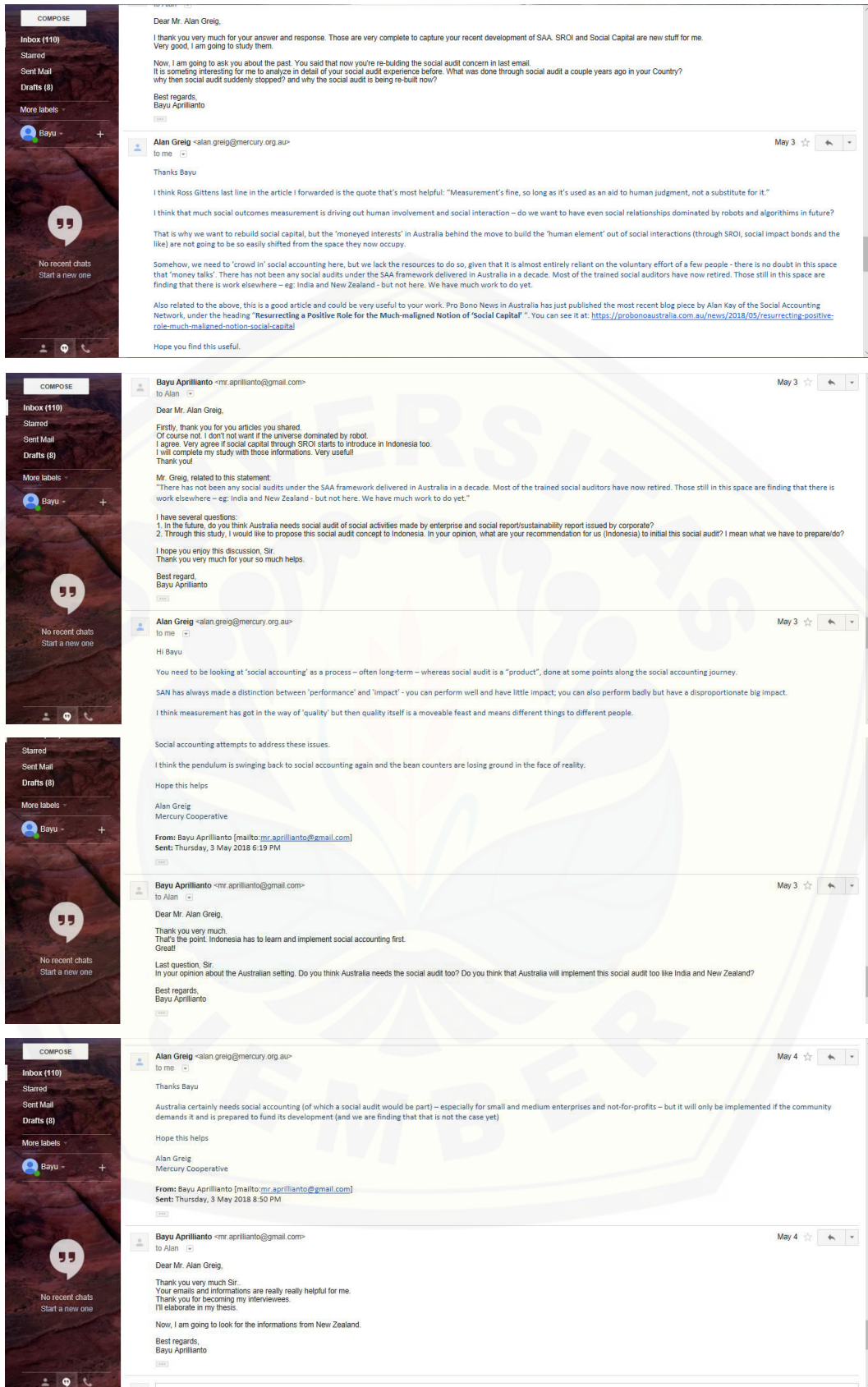
FWI

Alan Greig  
Mercury Cooperative

---

From: Alan Greig [mailto:alan.greig@mercury.org.au]  
Sent: Tuesday, 1 May 2018 11:25 AM  
To: 'Bayu Aprilianto' <mr.aprilianto@gmail.com>  
Subject: RE: Social Audit Inquiry from Indonesia

From: Bayu Aprilianto [mailto:mr.aprilianto@gmail.com]  
Sent: Monday, 30 April 2018 4:58 PM  
To: Alan Greig <alan.greig@mercury.org.au>  
Subject: Re: Social Audit Inquiry from Indonesia



## 2. Percakapan dengan Mr. Alan Kay dan Mrs. Anne Lythgoe

**Bayu Aprilianto** <mr.aprilianto@gmail.com> to Alan May 8

Dear Mr. Alan Kay,  
 Hope you are doing fine.  
 Thank you very much, Sir.  
 I have been in contact with Mr. Gavin Malles, from India. Do you know him?  
 I am going to propose a concept of social audit in Indonesia, especially the audit of social or sustainability report.  
 Thus, I need to analyse and learn the social audit experience of UK, because UK has lead the growth of CSR, social accounting and, social audit as well.  
 These are several questions about the social audit experience of UK.  
 1. How is the implementation of social audit in UK?  
 2. What is the standard of CSR report and social audit report in UK?  
 3. How do you conduct the social audit (the methodology)?  
 5. What is the background or the reason of social audit implementation in UK?  
 6. Is there any pros and cons of this issue?  
 7. Is there any obstacle you get during the implementation of this social audit?  
 8. About the relationship with the stakeholders such as government, corporate, investor, creditor, accountant. What are their roles or supports in the implementation of social audit in UK?  
 I am sorry for many questions I have. You can answer those by email or Skype.  
 Feel free to choose the best alternative for your time.  
 Thank you very much for your time, Sir.  
 Best Regards,  
 Bayu Aprilianto

**Alan Kay** <alan.kay20@gmail.com> to anne, Lisa, me May 8

Dear Bayu  
 Thank you for your questions. Many of them can be answered by looking at our [website](#) and [blogs](#) - with the blogs go back into the archive of what has been written over the last two years. We also have a Learning Platform with masses of information but you have to [join SAN UK](#) to have access to it - in includes the updated [Guide](#).  
 I suggest you do a bit of research into our website to learn about Social Accounting and Audit - a good place to start is the [history](#).  
 More specifically - your questions:  
 1. How is the implementation of social audit in UK? Sporadic. A lot of interest and application up until 2008 - especially in the voluntary (third sector). It then tailed off due to the Government's misguided interest in SROI as a universal way of accounting for value. Now it is not widely applied but nearly everyone sees the need.  
 2. What is the standard of CSR report and social audit report in UK? CSR Reports are often seen as marketing documents and are often not audited or audited in a benevolent way. The larger corporations see them as a way of appeasing the public and diverting attention away from what bad things they are doing.  
 3. How do you conduct the social audit (the methodology)? All of this is described in the [Guide](#) in detail - Panel of independent people, social audit trail, checklist, etc. The methodology has been tried extensively and improved over the years. See attached for an overview.  
 5. What is the background or the reason of social audit implementation in UK? If an organization's raison d'être is to create social and community benefits, then it should account for, and explain that benefit regularly, objectively and dispassionately. The Social Report is the work of the organisation and the audit provides the veracity and integrity.  
 6. Is there any pros and cons of this issue? Lots - see the blogs for the latest thinking.  
 7. Is there any obstacle you get during the implementation of this social audit? Lots - see blogs. BUT the main stumbling block is organisations in the Third Sector are often under-resourced and stretched AND they are not required to write regular social reports. At a stroke, Governments could change this by saying social reporting is mandatory for all organisation that profess social and community aims.  
 8. About the relationship with the stakeholders such as government, corporate, investor, creditor, accountant. What are their roles or supports in the implementation of social audit in UK? This is complex and you have to read around this. Look at the websites for Inspiring Impact, New Philanthropy Capital, Social Value UK, Third Sector Research Centre, Social Enterprise UK.  
 Hope this is useful. I suggest you do a lot more digging into the information on the internet - and then perhaps we can talk further.

**Bayu Aprilianto** to me, anne, Lisa May 8

Dear Mr. Alan Kay, Thank you very much, Sir. I think there are still so much ...

**Best regards**  
 Bayu Aprilianto

**Bayu Aprilianto** <mr.aprilianto@gmail.com> to Alan May 30

Dear Mr. Alan Kay,  
 Greetings! I hope you are doing fine.  
 I have read your attachments.  
 In my opinion, UK, India, also Australia are more sophisticated in social audit implementation.  
 You all have more awareness to this concern.  
 I see, UK and those countries concern to the social activities in individual, NGOs, or GO's.  
 I don't see that social audit implementation here in Indonesia (It's a challenge and interesting to be explored also in my study as a complementary explanation of social audit).  
 Let me tell you, the purpose of my study, I aim to propose a concept of social audit in Indonesia especially about audit of CSR report.  
 We are using GRI G4 as guideline of our report. I see if this report will have lack of credibility without social audit presence.  
 I am just thinking to make a concept of this kind of social audit like the procedure and the report of financial audit.  
 What do you think about this?  
 Looking forward to receiving your advices, Sir.

**Alan Kay** to me, anne, Lisa Jun 4

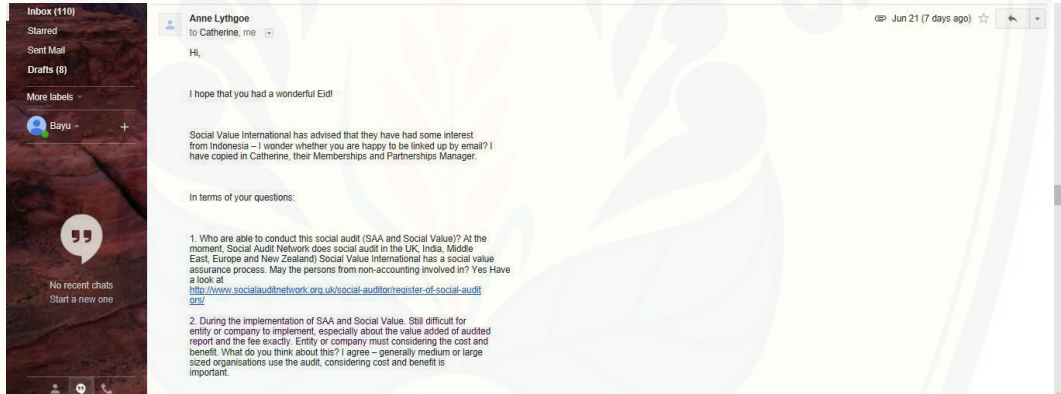
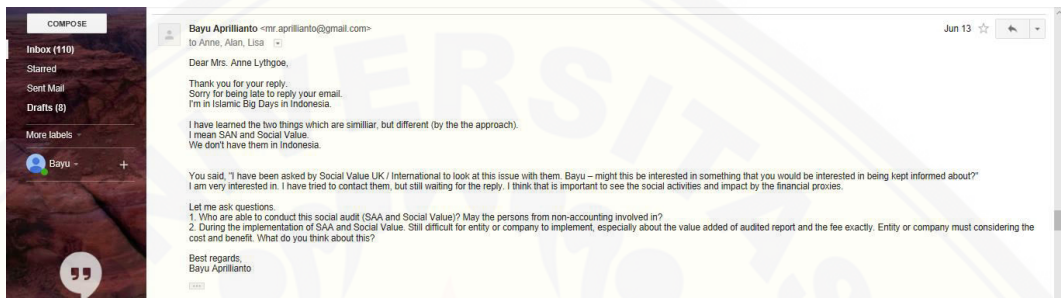
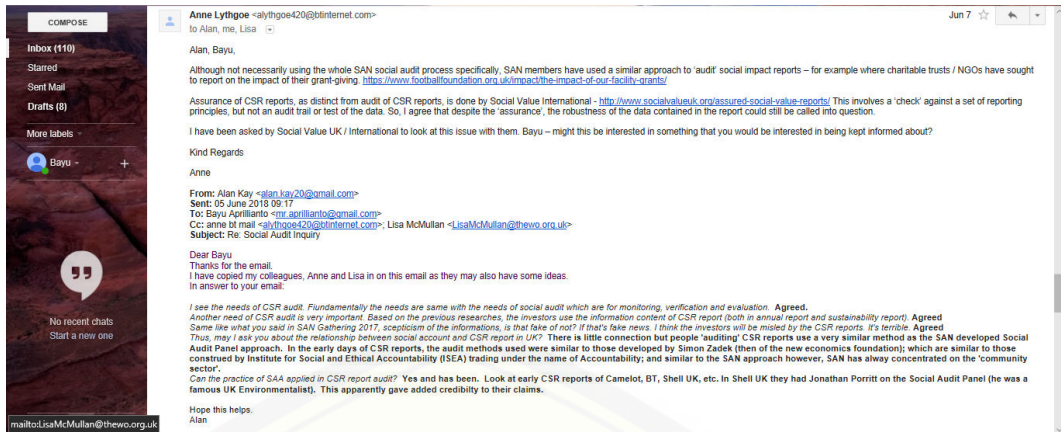
Dear Bayu  
 Thank you for your email.  
 I think the basis of your study is very interesting.  
 Let me know if you require any further information from me or SAN.  
 Best wishes and good luck.

**Dear Mr. Alan Kay,**  
 Firstly, thank you for your email.  
 I tried to find out the implementation of CSR audit, but I got nothing.  
 I see the needs of CSR audit. Fundamentally the needs are same with the needs of social audit which are for monitoring, verification and evaluation.  
 Another need of CSR audit is very important. Based on the previous researches, the investors use the information content of CSR report (both in annual report and sustainability report). Same like what you said in SAN Gathering 2017, scepticism of the informations, is that fake or not? If that's fake news, I think the investors will be misled by the CSR reports. It's terrible.  
 Thus, may I ask you about the relationship between social account and CSR report in UK?  
 Can the practice of SAA applied in CSR report audit?  
 Thank you very much Sir for your helps.  
 Best regards,  
 Bayu Aprilianto

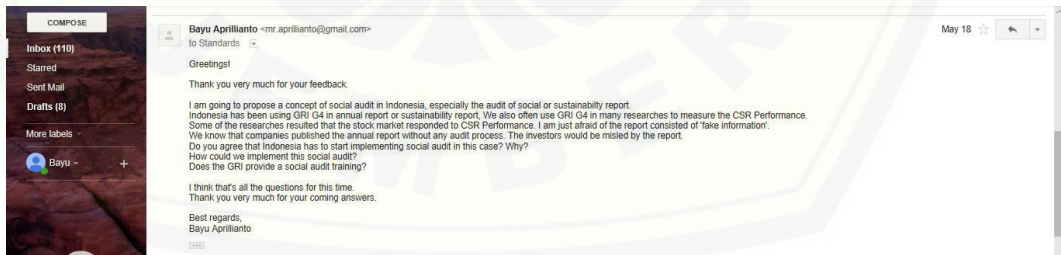
**Alan Kay** to me, anne, Lisa Jun 5

Dear Bayu  
 Thanks for the email.  
 I have copied my colleagues, Anne and Lisa in on this email as they may also have some ideas.  
 In answer to your email:  
 I see the needs of CSR audit. Fundamentally the needs are same with the needs of social audit which are for monitoring, verification and evaluation. **Agreed.**  
 Another need of CSR audit is very important. Based on the previous researches, the investors use the information content of CSR report (both in annual report and sustainability report). **Agreed**  
 Same like what you said in SAN Gathering 2017, scepticism of the informations, is that fake or not? If that's fake news, I think the investors will be misled by the CSR reports. It's terrible. **Agreed**  
 Thus, may I ask you about the relationship between social account and CSR report in UK? There is little connection but people 'auditing' CSR reports use a very similar method as the SAN developed Social Audit Panel approach. In the early days of CSR reports, the audit methods used were similar to those developed by Simon Zadek (then of the new economics foundation); which are similar to those constructed by Institute for Social and Ethical Accountability (ISEA) trading under the name of Accountability; and similar to the SAN approach however, SAN has always concentrated on the 'community sector'.  
 Can the practice of SAA applied in CSR report audit? Yes and has been. Look at early CSR reports of Camelot, BT, Shell UK, etc. In Shell UK they had Jonathan Porritt on the Social Audit Panel (he was a famous UK Environmentalist). This apparently gave added credibility to their claims.  
 Hope this helps.





### 3. Percakapan dengan Global Reporting Initiative (GRI)



**COMPOSE**

**Inbox (110)**  
Starred  
Sent Mail  
Drafts (8)  
More labels  
Bayu -  
No recent chats  
Start a new one

**Standards** <standards@globalreporting.org>  
to me May 22

Dear Bayu,

Thank you for your email.

Unfortunately, the questions you pose, are not ones that we can answer.


The practice of sustainability reporting with the GRI Standards is largely voluntary. The GRI Standards are issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB), an independent operating entity under the auspices of GRI with the sole responsibility for setting globally accepted standards for sustainability reporting. The GSSB does not check the accuracy or content of reports or whether reports have been prepared in accordance with the GRI Standards, as impartiality is important for maintaining credibility of a standard-setter.

The use of external assurance for sustainability reports is advised but is not required in order to make a claim that a report has been prepared in accordance with the GRI Standards. Organizations can use a variety of approaches to enhance the credibility of their reports. The approach to external assurance is required to be reported as specified in Disclosure 102-56 in GRI 102: General Disclosures.







External assurance providers are not accredited by GRI and we do not provide any social audit training.

Sorry we could not be of more assistance.

Kind regards,

 Standards

Whilst every attempt is made to ensure that the information in this email is correct, GRI can accept no responsibility for its content or for any consequences to any individual or organization as a result of following guidance contained therein.

 STANDARDS      **THE FUTURE OF REPORTING**  
[VIEW GRI STANDARDS HERE](#)

**Bayu Aprillianto** <mr.aprillianto@gmail.com>  
to Standards May 24

Greetings!

Firstly thank you very much for your feedback.

I understand. Initially, I just thought, perhaps besides you provide GRI, you're developing the concept of social audit. The verification of CSR report may be required, but still becomes difficult to find the institution dealing with. One question, do you have suggestion for me about the institution which provide this term (social audit of CSR report)?

Thank you very much for your help.

Best regards,  
Bayu Aprillianto

**Standards**  
to me May 29

Dear Bayu,

Thank you for your message.

Unfortunately, we are not able to suggest any institutions that provide social auditing of CSR reports.

The public information that GRI has available on external assurance/audit is in the GRI Standards, Disclosure 102-56 in GRI 102: General Disclosures. You may also find the following research publication of interest:  
<https://www.globalreporting.org/resource/library/GRI-Assurance.pdf>.

Sorry we could not be of more assistance.

Kind regards,